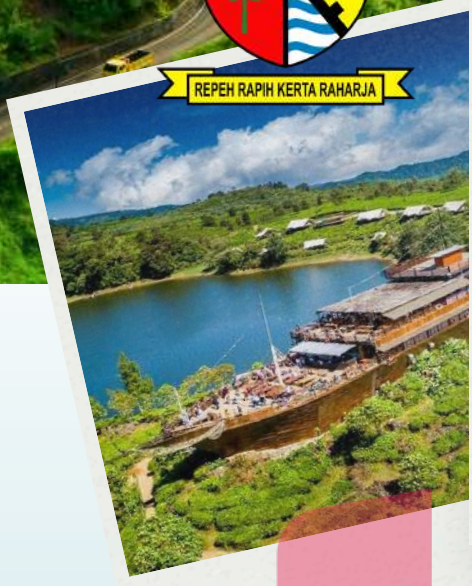
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP Tahun 2025

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA







BANDUNG
LEBIH BEDAS!

DINAS KEBUDAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

WWW.PPID.BANDUNGKAB.GO.ID

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga LKIP Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan salah satu perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kebudayaan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Dalam LKIP ini disajikan capaian kinerja yang dihasilkan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah, termasuk penguatan seni, tradisi, dan warisan budaya di Kabupaten Bandung melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sepanjang Tahun 2025. LKIP ini berfungsi sebagai alat penilai, pengendali, dan pemacu kinerja bagi seluruh aparatur, sekaligus sebagai wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja dalam LKIP ini diharapkan dapat menjadi referensi serta masukan bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung maupun para pemangku kepentingan dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan serta program/kegiatan pada tahun berikutnya.

Selain itu, laporan ini diharapkan menjadi umpan balik bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung untuk semakin fokus, efektif, efisien, terukur, transparan, dan produktif dalam meningkatkan kualitas kinerja, sehingga terwujud Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera melalui penguatan kebudayaan lokal dan pemajuan kebudayaan daerah.

Soreang, 23 Februari 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

IRVAN AHMAD, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197109031999031009

RINGKASAN EKSEKUTIF

LKIP Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis serta memberikan umpan balik sebagai dasar perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. LKIP Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan seluruh unsur perangkat daerah. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi hasil pengukuran kinerja.

Pada Tahun 2025, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung melaksanakan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan “Terwujudnya Berkebudayaan Maju” dengan indikator utama Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Target IPK sebesar 56,27 poin terealisasi sebesar 56,89 poin atau mencapai 101,10%. Sementara itu, indikator sasaran berupa persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina ditargetkan sebesar 45,45% dan terealisasi sebesar 54,55% atau mencapai 120,01%. Secara umum, seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 dapat tercapai dengan kategori sangat baik.

Dari sisi keuangan, pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 11.192.038.351,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.240.481.455,00 atau 73,62%. Tingkat serapan anggaran tersebut dikarenakan terdapat beberapa efisiensi pada belanja tertentu akibat kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Bandung. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja yang melampaui target pada seluruh indikator utama, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran Tahun 2025 relatif efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, khususnya dalam peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan serta persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina.

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 diharapkan menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam perumusan kebijakan serta perencanaan kinerja pada tahun mendatang. Ke depan, diperlukan penguatan tata kelola, kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pelaku budaya, serta optimalisasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja guna mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan secara berkelanjutan. Dengan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung diharapkan semakin kuat dan berkontribusi nyata terhadap terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih BEDAS.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. GAMBARAN UMUM 1

1.1.1 Maksud dan Tujuan 2

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 3

1.1.3 Organisasi dan Sumber Daya Dinas Kebudayaan 3

1.2. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 8

1.3. DASAR HUKUM 10

1.4. SISTEM PENYAJIAN 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

2.1. RENCANA STRATEGIS DISBUD TAHUN 2025-2029 14

2.1.1. Casecading Kinerja dan Proses Bisnis 14

2.1.2. Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan 17

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 18

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 19

2.4. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 21

3.1.1. Tujuan : Terwujudnya Berkebudayaan Maju 23

3.1.2. Sasaran : Meningkatkan Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda terhadap Pembangunan Daerah 32

3.1.3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 38

3.1.4. Instrumen/Inovasi Pendukung Capaian Kinerja 2025 40

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2025 41

3.2.1. Realisasi Anggaran 41

3.3. PRESTASI DAN PENGHARGAAN 45

BAB IV PENUTUP 48

4.1 KESIMPULAN 48

4.2 LANGKAH-LANGKAH DIMASA MENDATANG YANG AKAN DILAKUKAN 49

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Komposisi Pegawai Dinas Kebudayaan 6
Tabel I.2 Jumlah Pegawai dan Tingkat Pendidikan ASN 7
Tabel I.3 Analisa Jumlah Pegawai berdasarkan Gender 7
Tabel I.4 Sarana Pelayanan Dinas Kebudayaan 8
Tabel II.1 Ringkasan Visi, Misi, Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 15
Tabel II.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Disbudpar Tahun 2021-2026 18
Tabel II.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Disbud Tahun 2025-2029 18
Tabel II.4 Indikator Kinerja Utama Disbud Tahun 2025-2029 19
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Disbudpar Tahun 2025 20
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2025 20
Tabel II.7 Anggaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 20
Tabel II.8 Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2025 21
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 22
Tabel III.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Pembangunan Kebudayaan 29
Tabel III.3 Program/Kegiatan yang menunjang Indeks Pembangunan Kebudayaan 29
Tabel III.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina 36
Tabel III.5 Program/Kegiatan yang Menunjang Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindung, dikembangkan, dmanfaatkan, dan dibina 37
Tabel III.6 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 39
Tabel III.7 Realisasi Anggaran Tahun 2025 41
Tabel III.40 Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Bagan struktur organisasi Disbud Kab. Bandung 5
Gambar II.1 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029 15
Gambar II.2 Peta Proses Bisnis Disbud Kab. Bandung 16
Gambar II.3 Pohon Kinerja dan *Crosscutting* Kinerja Disbud Tahun 2025 16
Gambar II.4 Penetapan IKU Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029 19
Gambar III.1 Dashboard Aplikasi SIDALMONEP 21
Gambar III.2 Dashboard Aplikasi SIAKANG 22
Gambar III.3 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan 23
Gambar III.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 . 23
Gambar III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra 2025-2029 24
Gambar III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra 2021-2026 24
Gambar III.7 Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional 25
Gambar III.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan 25
Gambar III.9 Rekomendasi Penyesuaian Target Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2026 27
Gambar III.10 Upaya Perbaikan Peningkatan Kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2026 28
Gambar III.11 Dokumentasi Program/ Kegiatan Penunjang Indeks Pembangunan Kebudayaan 31
Gambar III.12 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindung, dikembangkan, dmanfaatkan, dan dibina Tahun 2025 32
Gambar III.13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 202432
Gambar III.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Renstra 2025-2029 33
Gambar III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Renstra 2021-2026 33
Gambar III.16 Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Provinsi Jawa Barat 34
Gambar III.17 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina 34
Gambar III.18 Rekomendasi Penyesuaian Target Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina Tahun 2026 35
Gambar III.19 Upaya Perbaikan Kinerja Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina Tahun 2026 36
Gambar III.20 Tampilan Aplikasi SIAKANG 40
Gambar III.21 Tampilan Aplikasi Sidalmonep 40
Gambar III.22 Alur Kegiatan SAPA PESONA BUDAYA BEDAS 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung merupakan perangkat daerah yang memiliki mandat strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Peran Dinas Kebudayaan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan program dan kegiatan, namun juga sebagai penggerak pemajuan kebudayaan daerah dalam rangka memperkuat identitas, karakter, serta daya saing masyarakat Kabupaten Bandung. Kebudayaan menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan daerah karena berperan dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai kearifan lokal, memperkokoh kohesi sosial, serta menciptakan ruang ekspresi dan kreativitas masyarakat.

Dalam kerangka pembangunan daerah, pemajuan kebudayaan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebudayaan berkontribusi dalam membangun tatanan sosial yang harmonis, memperkuat rasa kebersamaan, serta menjadi sumber inspirasi bagi tumbuhnya kreativitas masyarakat. Selain itu, kebudayaan juga memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara inklusif dan berkelanjutan.

Secara kelembagaan, penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Bandung pada Tahun 2025 memasuki fase baru seiring dengan pemisahan urusan kebudayaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi perangkat daerah yang berdiri sendiri, yaitu Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Pemisahan ini merupakan bagian dari penataan organisasi perangkat daerah yang bertujuan untuk memperkuat fokus, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan urusan kebudayaan. Dengan terbentuknya perangkat daerah yang mandiri, pelaksanaan program dan kegiatan kebudayaan dapat dirancang secara lebih spesifik, terarah, dan berbasis pada kebutuhan riil pemajuan kebudayaan daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung pada Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Bandung “Lebih BEDAS” (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera). Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, sasaran pembangunan yang diampu oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung adalah Penguatan Kebudayaan Lokal, yang diwujudkan melalui berbagai upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Sasaran ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat jati diri daerah di tengah dinamika perubahan sosial dan perkembangan zaman.

Tahun 2025 juga merupakan tahun pertama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai perangkat daerah yang mandiri. Oleh karena itu, LKIP Tahun 2025 memiliki karakteristik khusus sebagai laporan kinerja perdana yang tidak hanya memuat capaian indikator kinerja, tetapi juga menggambarkan proses konsolidasi kelembagaan, penyesuaian sistem perencanaan dan penganggaran, serta penyelarasan indikator kinerja dalam masa transisi dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021–2026 menuju Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2025–2029.

LKIP Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada perangkat daerah selama satu tahun anggaran. LKIP ini merupakan bagian penting dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang berfungsi sebagai instrumen pengukuran, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja secara terukur, sistematis, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Penyusunan LKIP ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui penyusunan LKIP, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung menegaskan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, LKIP ini tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban formal, tetapi juga menjadi bahan refleksi dan pembelajaran organisasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta penguatan capaian indikator kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, LKIP Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai capaian kinerja perangkat daerah dalam masa transisi kelembagaan, sekaligus menjadi dasar pengambilan kebijakan dan penyempurnaan strategi dalam rangka mewujudkan Penguatan Kebudayaan Lokal yang berkelanjutan demi terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih BEDAS.

1.1.1 Maksud dan Tujuan

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung
2. Mendorong Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penguatan kebudayaan lokal dan pemajuan kebudayaan daerah.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2025 Tugas Pokok Dinas Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, yang meliputi pengembangan kebudayaan, pelestarian sejarah, budaya dan museum, serta pengelolaan kawasan pemajuan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang terkait dengan kebudayaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional untuk pengembangan, pelestarian, dan pemajuan kebudayaan daerah;
4. pengelolaan administrasi dinas secara menyeluruh dan akuntabel; serta
5. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangan yang berlaku.

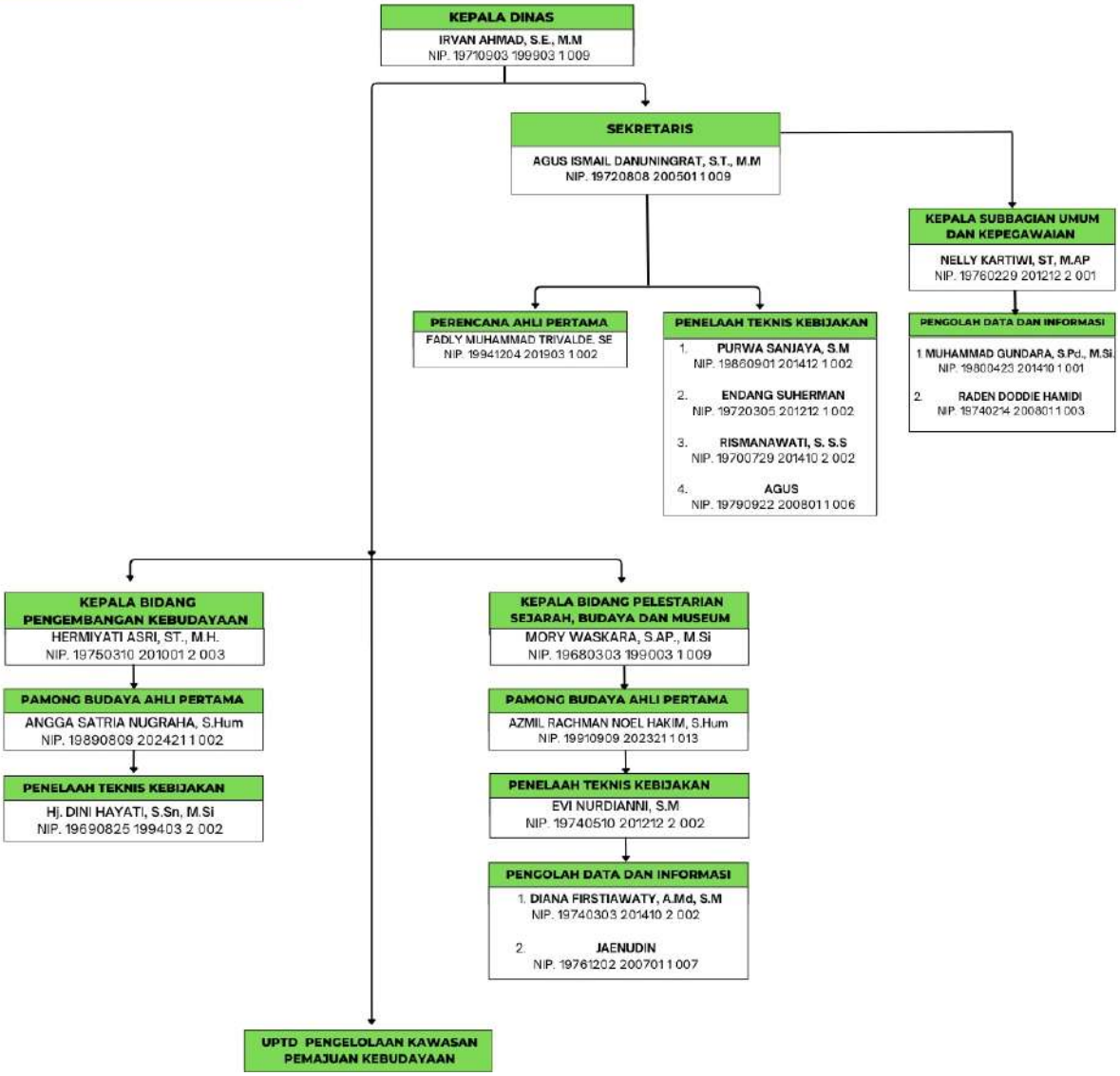
1.1.3 Organisasi dan Sumber Daya Dinas Kebudayaan

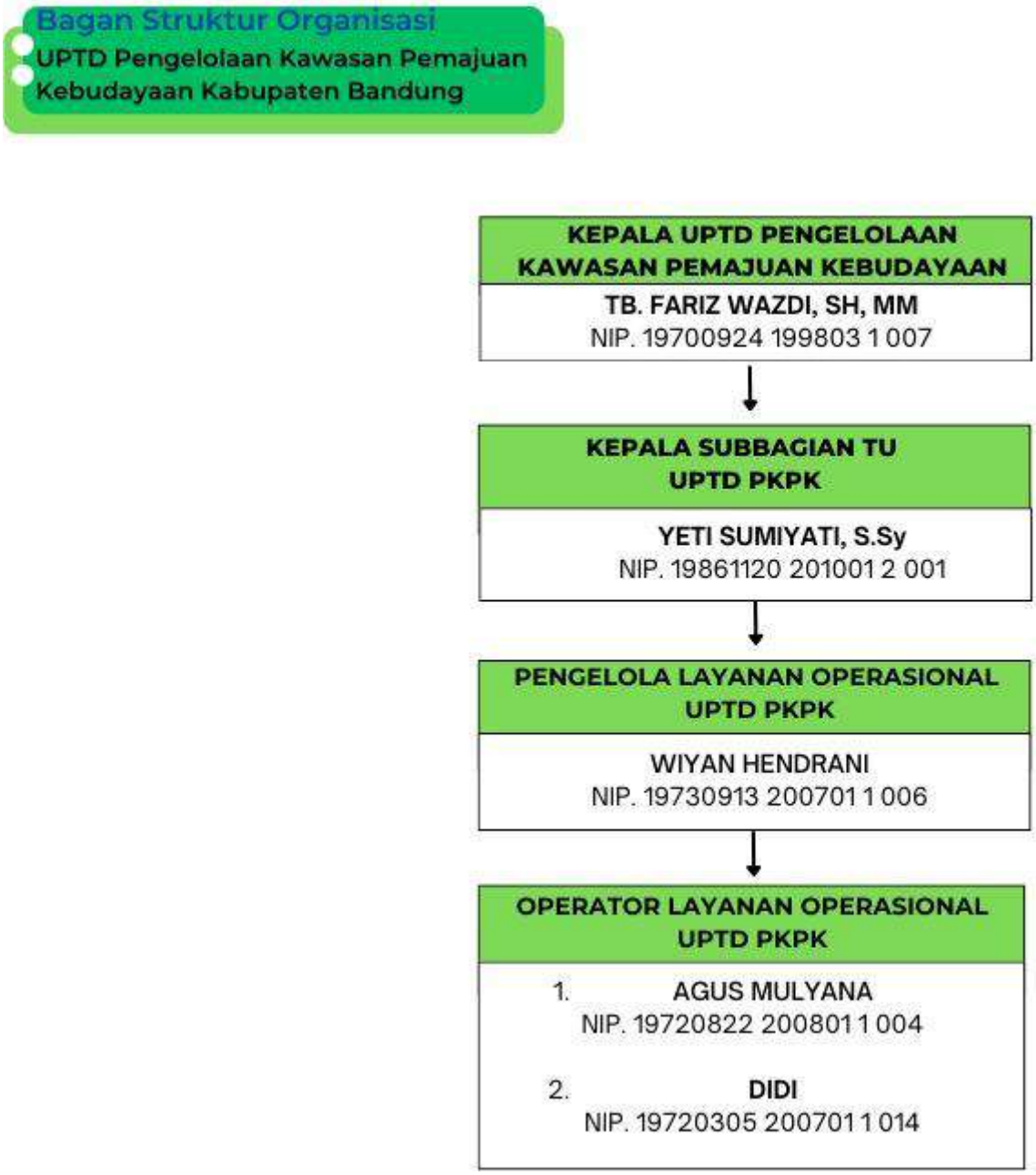
1.1.2.1. Struktur Organisasi

Secara historis, urusan kebudayaan di Kabupaten Bandung sebelumnya berada dalam Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bandung. Dalam perkembangannya, seiring dengan meningkatnya kompleksitas urusan pemerintahan dan kebutuhan penajaman fokus pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan penataan kelembagaan melalui pemisahan urusan kebudayaan dan pariwisata menjadi perangkat daerah yang berdiri sendiri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai perangkat daerah yang secara khusus menangani urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Pemisahan ini bertujuan untuk memperkuat fokus kebijakan, meningkatkan efektivitas pembinaan dan pelindungan objek pemajuan kebudayaan, serta mendorong penguatan identitas budaya daerah secara lebih terarah dan terukur.

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung





Gambar I.1 Bagan struktur organisasi Disbud Kab. Bandung

1.1.2.2. Sumber Daya Aparatur

Pada tahun 2025 Jumlah pegawai Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, terdiri dari 21 orang PNS dan 2 orang PPPK. Jumlah pegawai yang ada dibanding jumlah kebutuhan pegawai atau jumlah ideal pegawai sesuai beban kerja disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel I.1 Komposisi Pegawai Dinas Kebudayaan

No	Bidang/UPTD	Struktural								Fungsional										Tot	
		JPT Pratama		Administrator		Pengawas		Pelaksana		Perencana		Analis SDM		Pranata Komputer		Arsiparis		Pamong Budaya			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kepala Dinas	1																		1	
2	Sekretariat			1			1	4	1	1										6	2
3	Bidang Pengembangan Kebudayaan				1			1	1									1		2	2
4	Bidang Pelestarian Sejarah Budaya dan Museum			1				1	2									1		3	2
5	UPTD Kawasan Pemajuan Kebudayaan			1			1	3												4	1
	JUMLAH	1		3	1		2	9	5	1								2		16	7

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2025

Berdasarkan tabel nominatif pegawai, total pegawai yang tercatat adalah 23 orang yang tersebar di berbagai bidang dan unit kerja. Berikut analisis dari data tersebut:

1. Komposisi Jabatan
   a. Sebagian besar pegawai berada di sekretariat (8 orang), pegawai lainnya tersebar di berbagai bidang yaitu di UPTD Pengelolaan Kebudayaan (5 orang), Bidang Pelestarian Sejarah, budaya, dan museum (5 orang), Bidang Pengembangan kebudayaan (4 orang).
   b. Jabatan struktural terdiri dari JPT Pratama (1 orang), Administrator (3 orang), dan Pengawas (3 orang). Ini menunjukkan bahwa jumlah pejabat struktural relatif sedikit dibandingkan dengan pegawai pelaksana dan fungsional
2. Distribusi Pegawai Fungsional
   a. Jabatan fungsional analis sumber daya manusia, pranata komputer dan arsiparis belum terdapat pegawai (0 orang), yang menunjukkan adanya kekosongan pada posisi strategis terkait pengembangan SDM, pengelolaan data, maupun dokumentasi arsip.
   b. Jabatan fungsional Pamong Budaya (2 orang) dan fungsional perencana (1 orang) merupakan jabatan fungsional yang terisi dalam tabel ini. Jumlahnya masih terbatas, namun menunjukkan adanya perhatian terhadap perencanaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
   c. Distribusi fungsional yang minim pada kategori lain dapat berdampak pada kurang optimalnya fungsi analisis kepegawaian, manajemen data, dan

manajemen arsip sehingga perlu adanya penguatan jumlah dan kompetensi pada jabatan fungsional tertentu.

Tabel I.2 Jumlah Pegawai dan Tingkat Pendidikan ASN

No	Bidang/ UPTD	Pendidikan								Tot
		S3	S2	S1	D IV	D III	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas		1							1
2	Sekretariat		3	3			2			8
3	Bidang Pengembangan Kebudayaan		2	2						4
4	Bidang Pelestarian Sejarah Budaya dan Museum		1	4						5
5	UPTD Kawasan Pemajuan Kebudayaan		1	1			3			5
JUMLAH			**8**	**9**			**5**			**23**

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2025

Pada pendidikan strata 1 (S1) dilatarbelakangi oleh berbagai disiplin ilmu seperti sarjana administrasi negara, sastra, antropologi, administrasi pendidikan, administrasi pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial politik, sejarah, biologi, seni, manajemen, teknik planologi, arsitek, hubungan internasional, bahasa, statistik, ilmu komunikasi, dan pariwisata. Sedangkan pada program strata 2 (S2) dilatarbelakangi oleh pendidikan magister manajemen, kajian budaya, administrasi pendidikan, hukum, administrasi negara, sastra, ekonomi, permuseuman, dan pariwisata.

Tabel I.3 Analisa Jumlah Pegawai berdasarkan Gender

No	Uraian	L	P	Total
1	Kepala Dinas	1		1
2	Sekretariat	6	2	8
3	Bidang Pengembangan Kebudayaan	2	2	4
4	Bidang Pelestarian Sejarah Budaya dan Museum	3	2	5
5	UPTD Kawasan Pemajuan Kebudayaan	4	1	5
	JUMLAH	**15**	**7**	**23**

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2025

Komposisi pegawai menunjukkan dominasi laki-laki, 7 pegawai adalah perempuan, menunjukkan tingkat representasi yang relatif seimbang secara umum. Persentase laki laki sebesar 68% dan perempuan sebesar 32%. Meskipun proporsi pegawai laki-laki lebih tinggi, partisipasi perempuan sudah cukup signifikan dan merata di beberapa bidang. Berikut analisa gender dari jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung.

1.1.2.3. *Kondisi Sarana dan Prasarana*

Saat ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung memiliki 3 (tiga) sarana yang dapat digunakan untuk ruang atraksi dan apresiasi budaya serta pelayanan Dinas Kebudayaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.4 Sarana Pelayanan Dinas Kebudayaan

No	Sarana Pelayanan Urusan Kebudayaan
1.	UPTD PENGELOLAAN KAWASAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN a. GEDONG BUDAYA SOREANG b. DOME BALERAME c. GEDUNG SCIENCE CENTER

Berikut adalah ruang informasi resmi terkait Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung:

a. Website resmi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dengan situs: www.disbud.bandungkab.go.id
b. Sosial Media Dinas Kebudayaan:
   - Instagram : @disbud.kabbdg
   - Tiktok : @disbud.kabbdg
c. Sosial Media UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan Kebudayaan:
   - Instagram : @sciencecenter_soreang

1.2. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Secara umum, pada Tahun 2025 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung berfokus pada penguatan peran kebudayaan sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan, sekaligus sebagai instrumen penguatan identitas, kohesi sosial, serta penggerak ekonomi kreatif berbasis seni budaya. Kebijakan ini sejalan dengan visi Kabupaten Bandung Lebih BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera), khususnya pada sasaran pembangunan yang diampu Dinas Kebudayaan yaitu Penguatan Kebudayaan Lokal.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung merupakan perangkat daerah baru hasil pemekaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kondisi tersebut menuntut penguatan tata kelola kelembagaan, pemetaan kebutuhan layanan kebudayaan, serta penajaman fokus urusan kebudayaan agar penyelenggaraan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, Dinas Kebudayaan tidak hanya dituntut untuk melaksanakan agenda pembangunan kebudayaan secara rutin, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan kebudayaan dapat terukur melalui indikator kinerja, selaras dengan dokumen perencanaan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Mengacu pada Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, isu strategis pembangunan kebudayaan lima tahun ke depan meliputi:

a. Penguatan pelindungan dan revitalisasi warisan budaya lokal sebagai identitas daerah
b. Peningkatan literasi budaya dan pelibatan generasi muda dalam pelestarian budaya
c. Penguatan SDM dan kelembagaan kebudayaan
d. Pemanfaatan kebudayaan untuk mendorong ekonomi kreatif daerah
e. Integrasi nilai-nilai budaya dalam perencanaan pembangunan daerah berkelanjutan.

Seiring meningkatnya dinamika sosial dan perkembangan zaman, pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung menghadapi sejumlah tantangan strategis. Masyarakat semakin menuntut layanan seni budaya yang lebih merata, inklusif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan sosial, terutama dalam memperkuat karakter daerah serta membangun kebanggaan terhadap budaya lokal. Selain itu, keberlanjutan ekosistem kebudayaan juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan pelaku seni budaya, kelembagaan kesenian, pelindungan warisan budaya, dan ketersediaan ruang publik yang mendukung aktivitas budaya.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung pada Tahun 2025 meliputi:

a. **Belum optimalnya perlindungan dan kesejahteraan pelaku seni budaya**

   Pelaku seni budaya merupakan aktor utama dalam pelestarian dan pewarisan budaya lokal. Namun demikian, masih diperlukan penguatan perlindungan sosial serta dukungan yang memadai agar pelaku seni budaya memiliki rasa aman, keberlanjutan berkarya, dan peningkatan kesejahteraan.

b. **Belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan dan kegiatan seni budaya**

   Pemerataan layanan seni budaya masih menjadi tantangan agar manfaat pembangunan kebudayaan dapat dirasakan hingga tingkat kecamatan dan desa. Hal ini penting untuk meningkatkan partisipasi publik, memperkuat ruang ekspresi budaya, serta mendorong tumbuhnya ekosistem budaya berbasis komunitas.

c. **Belum optimalnya peran kebudayaan sebagai instrumen pemulihan sosial masyarakat**

   Kebudayaan memiliki fungsi strategis sebagai media pemulihan psikososial, terutama pada masyarakat terdampak bencana maupun kondisi sosial tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan layanan kebudayaan yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan, namun juga mampu memberikan dampak sosial yang nyata.

d. **Kelembagaan kesenian dan dukungan sarana prasarana masih perlu diperkuat**

   Keberadaan sanggar seni, lingkung seni, dan paguron merupakan pilar pembinaan dan regenerasi kesenian. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan penguatan legalitas kelembagaan, tertib administrasi, serta dukungan sarana prasarana agar kelembagaan kesenian dapat berkembang lebih profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan.

e. **Pelindungan, pelestarian, dan pengakuan objek pemajuan kebudayaan belum sepenuhnya optimal**

   Pelindungan warisan budaya, baik budaya takbenda maupun benda (cagar budaya), memerlukan penguatan legitimasi melalui penetapan dan pengakuan, serta dukungan pemeliharaan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga nilai sejarah, fungsi edukasi, dan keberlanjutan aset budaya sebagai warisan generasi mendatang.

f. **Literasi sejarah dan optimalisasi ruang publik sebagai pusat aktivitas budaya perlu ditingkatkan**

   Penguatan identitas daerah tidak terlepas dari peningkatan literasi sejarah dan pemanfaatan ruang publik sebagai ruang ekspresi budaya. Upaya ini diperlukan agar masyarakat memiliki akses terhadap layanan edukasi kebudayaan, ruang apresiasi, serta aktivitas kreatif yang mendorong tumbuhnya kebanggaan terhadap budaya lokal.

Untuk merespons isu strategis tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung pada Tahun 2025 melaksanakan berbagai upaya yang diarahkan pada peningkatan perlindungan pelaku seni budaya, pemerataan kegiatan seni budaya di wilayah, penguatan layanan kebudayaan dalam pemulihan sosial, penguatan kelembagaan kesenian dan dukungan sarana prasarana, pelestarian serta pengakuan objek pemajuan kebudayaan, serta peningkatan literasi sejarah dan optimalisasi ruang publik budaya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa isu strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung pada Tahun 2025 berpusat pada **belum optimalnya ketahanan budaya dan kontribusi Budaya Sunda terhadap pembangunan daerah**, yang ditandai dengan perlunya penguatan pelindungan dan kesejahteraan pelaku budaya, pemerataan akses kegiatan seni budaya, penguatan kelembagaan kesenian, pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan, serta peningkatan literasi sejarah dan optimalisasi ruang publik budaya. Simpulan isu strategis ini menjadi dasar penetapan tujuan **Terwujudnya Berkebudayaan Maju** serta sasaran strategis yaitu **Meningkatkan Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda terhadap Pembangunan Daerah**.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntanbilitias Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evalulasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;
h. Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
i. Peraturan Bupati Bandung Nomor 176 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
j. Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan;
k. Peraturan Bupati Bandung Nomor 277 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

1.4. SISTEM PENYAJIAN

Sistematika Penulisan LKIP Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I - PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusun LKIP dan sistem penyajian LKIP.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan Renstra 2025 – 2029 (jelaskan masa transisi peralihan dari Renstra lama ke Renstra baru. Renstra hasil reviu/perubahan Renstra) tujuan, sasaran, indikator dan

target renstra selama lima tahun, penjelasan IKU lama dan baru dan Perjanjian Kinerja lama dan Perjanjian Kinerja baru 2025.

BAB III - AKUNTANBILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis dan efesiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV - PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DISBUD TAHUN 2025-2029



Tahun 2025 merupakan tahun masa transisi kelembagaan dan perencanaan sebagai dampak dari pemisahan Dinas Kebudayaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pada periode ini terjadi peralihan dokumen perencanaan dari Renstra Disbudpar 2021–2026 menuju Renstra Dinas Kebudayaan 2025–2029. Masa transisi ini mencakup penyesuaian indikator kinerja, penataan ulang struktur program dan kegiatan, serta penyelarasan target pembangunan kebudayaan dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung ditetapkan melalui **Peraturan Bupati Bandung Nomor 277 Tahun 2025** tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung merupakan komitmen Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

2.1.1. Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dijabarkan melalui tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang selanjutnya diturunkan ke dalam sasaran perangkat daerah sebagaimana tergambar dalam alur cascading RPJMD.

Pada periode RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026, Dinas Kebudayaan (yang saat itu masih tergabung dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) mendukung Misi Ke-1 (satu) yaitu Membangkitkan Daya Saing Daerah dan Misi ke-4 (empat) yaitu Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Kelembagaan dalam Pelayanan Publik.

Memasuki periode RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, setelah terbentuk sebagai perangkat daerah yang mandiri, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung mendukung Misi ke-1 (satu) yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan bagi Anak.

Dalam konteks urusan kebudayaan, visi dan misi tersebut memberikan landasan penting bagi penguatan karakter masyarakat, pelestarian nilai budaya, serta pengembangan kreativitas berbasis kearifan lokal. Kebudayaan diposisikan sebagai instrumen strategis dalam membangun masyarakat yang berkarakter, berdaya saing, dan

memiliki identitas yang kuat di tengah dinamika globalisasi. Dengan demikian, peran Dinas Kebudayaan dalam dua periode perencanaan tersebut menunjukkan kesinambungan arah kebijakan, dari penguatan daya saing daerah berbasis budaya menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui penguatan kebudayaan lokal

Keterkaitan Visi dan Misi yang berkaitan dengan Dinas Kebudayaan dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur cascading RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut :

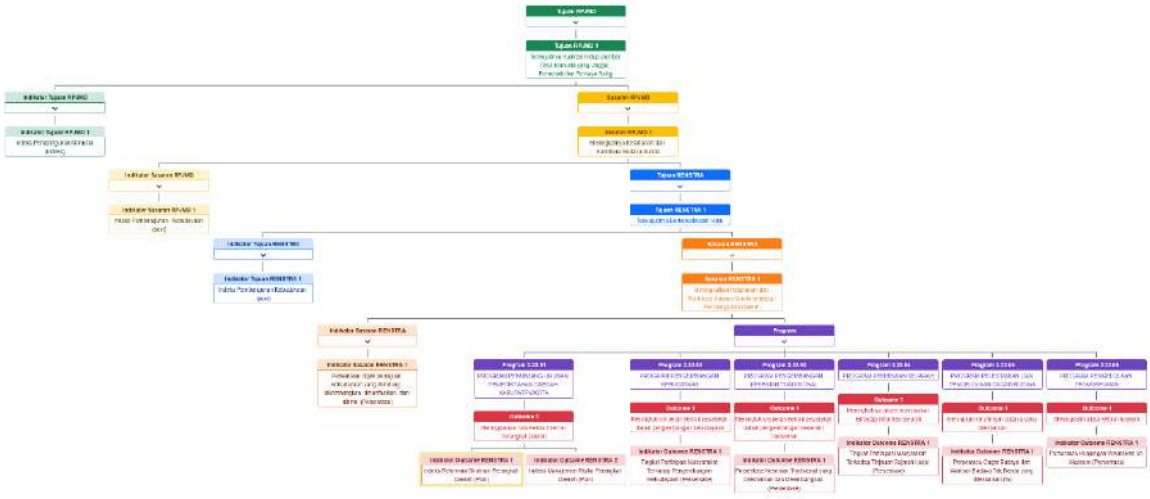
Tabel II.1 Ringkasan Visi, Misi, Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Visi	Misi Terkait	Sasaran Daerah
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju, Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas	Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak	Meningkatnya Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda

Sumber : Bapperida Kab. Bandung, RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

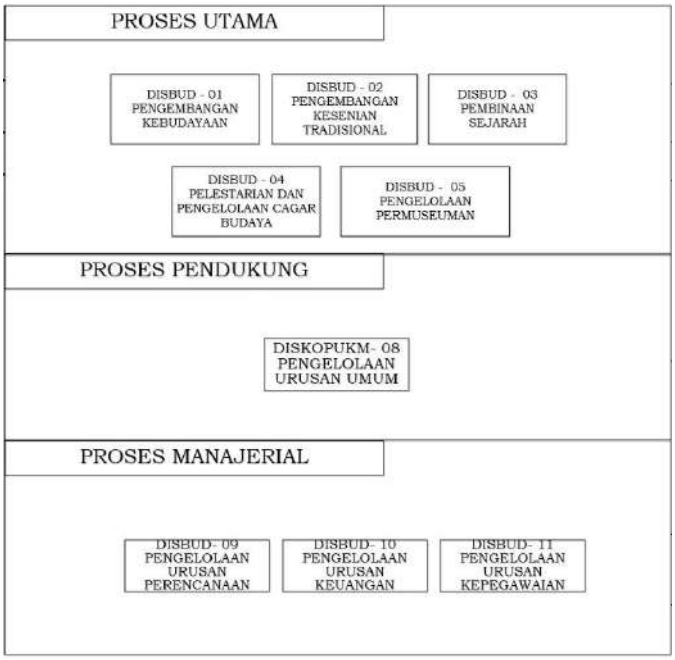
2.1.2. Casecading Kinerja dan Proses Bisnis

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Berdasarkan RPJMD tersebut skema kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai berikut:



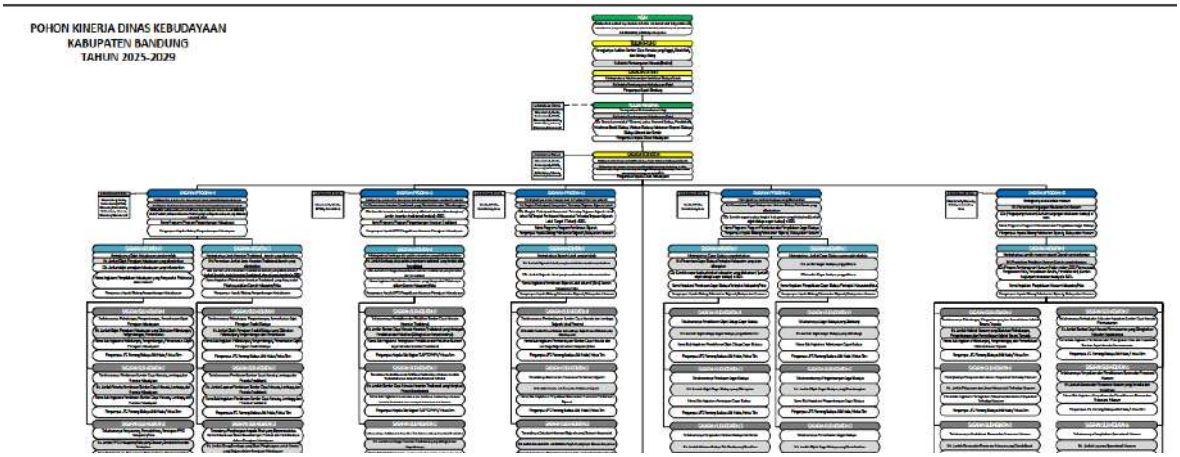
Gambar II.1 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029

Dari gambar pemetaan cascading kinerja diatas menggambarkan keterkaitan strategis dari RPJMD dengan Renstra perangkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Fokusnya pada peningkatan ketahan dan kontribusi budaya sunda terhadap Pembangunan daerah.



Gambar II.2 Peta Proses Bisnis Disbud Kab. Bandung

Dari gambar peta proses bisnis diatas menunjukkan struktur dan fungsi utama Dinas Kebudayaan. **Proses utama** mencakup layanan langsung kepada masyarakat, **proses pendukung** menangani kebutuhan administrasi, dan **proses manajerial** memastikan kelancaran operasional dan akuntabilitas organisasi. Diagram ini menggambarkan tata kelola yang terintegrasi untuk mencapai penguatan kebudayaan lokal.



Gambar II.3 Pohon Kinerja dan *Crosscutting* Kinerja Disbud Tahun 2025

Pohon Kinerja dan Crosscutting Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2024 menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat penyelenggaraan urusan kebudayaan di daerah. Melalui strategi yang terukur dan

berorientasi pada sasaran **Penguatan Kebudayaan Lokal**, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan mampu meningkatkan pelestarian serta pemanfaatan budaya sebagai identitas daerah, memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas seni budaya, serta memberikan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan

Tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung merupakan arah utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan penganggaran perangkat daerah. Penetapan tujuan dan sasaran ini diarahkan untuk memastikan pembangunan kebudayaan berjalan terukur, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yaitu Penguatan Kebudayaan Lokal.

Pada periode sebelumnya, arah kebijakan dan program urusan kebudayaan masih berada dalam dokumen Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026. Seiring dengan perubahan kelembagaan perangkat daerah, urusan kebudayaan kemudian difokuskan dan dikelola secara lebih spesifik melalui pembentukan perangkat daerah tersendiri, yaitu Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Kondisi ini menjadi landasan penting bagi penyusunan dokumen perencanaan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan urusan kebudayaan.

Selanjutnya, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung menyusun dan menetapkan arah pembangunan kebudayaan dalam Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman utama dalam penguatan tata kelola kinerja, penajaman prioritas program, serta penyelarasan dengan arah kebijakan pembangunan daerah pada periode 2025–2029.

Dengan demikian, Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, karena pada tahun ini terjadi peralihan dari pedoman Renstra sebelumnya (Renstra Disbudpar 2021–2026) menuju pedoman Renstra baru (Renstra Disbud 2025–2029). Masa transisi ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan dokumen perencanaan, tetapi juga mencakup proses penyesuaian target kinerja, penyelarasan indikator, penguatan struktur program, serta penguatan koordinasi pelaksanaan urusan kebudayaan agar lebih fokus, efektif, dan berdampak.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Disbudpar Tahun 2021-2026

VISI "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera"									
Misi 1. Membangkitkan Daya Saing Daerah									
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Kinerja**				
					2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1.	Meningkatnya daya saing pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan melalui kolaborasi dan integrasi kearifan lokal, alam dan budaya di Kabupaten Bandung		**Indeks Pembangunan Kebudayaan**	**Poin**	**49**	**50**	**51**	**52,25**	**52,50**
		Meningkatnya kualitas pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan di kabupaten bandung	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	9	18	27	27	27
Misi 4. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Kelembagaan dalam Pelayanan Publik									
2.	Meningkatnya Tatakelola Disbudpar		• **Nilai LKIP Disbudpar** • **Presentase Aset Dalam Kondisi Baik**	**Poin** **%**	**74** **92,50**	**79** **93,00**	**80** **93,25**	**81** **93,50**	**80** **93,75**
		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Disbudpar	Nilai AKIP	Point	74	79	80	81	80
			Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	%	92,50	93,00	93,25	93,50	93,75

Sumber : Disbudpar, 2025

Tabel II.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Disbud Tahun 2025-2029

VISI "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju, Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas"									
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak									
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Kinerja**				
					2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1.	Terwujudnya Berkebudayaan Maju		**Indeks Pembangunan Kebudayaan**	**Poin**	**56,31-56,73**	**56,73-57,29**	**57,15-57,87**	**57,57-58,44**	**58,00-59,02**
		Meningkatkan Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda terhadap Pembangunan Daerah	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina	%	45,45	54,55	54,55	63,64	63,64

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2025

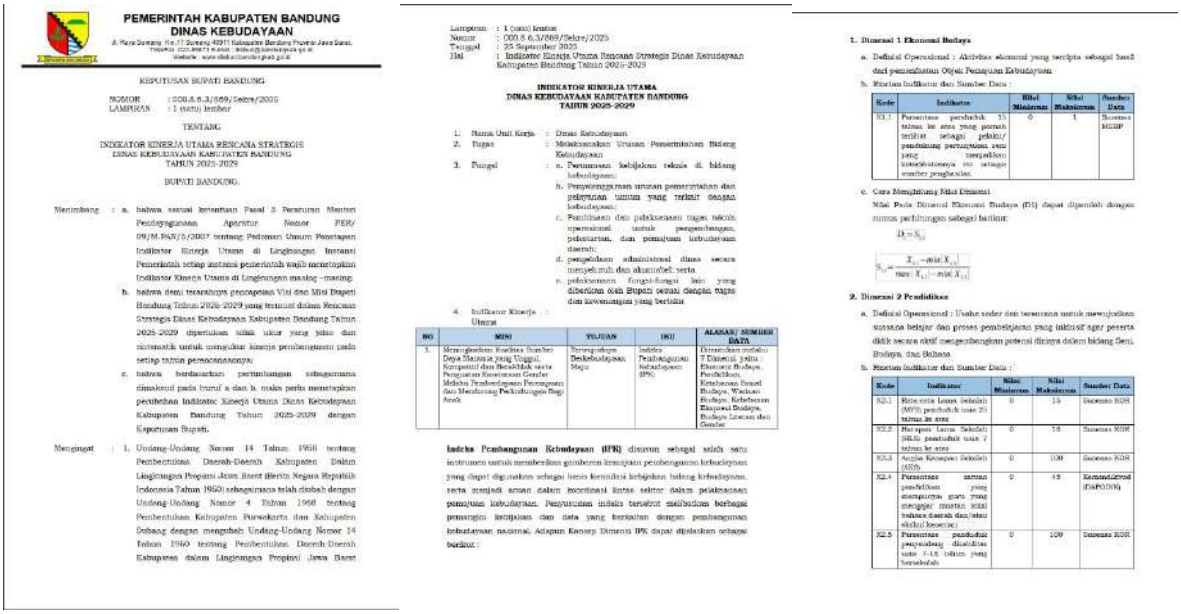
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 000.8.6.3/869/Sekre/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel II.4 Indikator Kinerja Utama Disbud Tahun 2025-2029

No	Misi	Tujuan	IKU	Alasan/ Sumber Data
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak	Terwujudnya Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Ditentukan melalui 7 Dimensi, yaitu : Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Kebebasan Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2025


PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 000.8.6.3/869/Sekre/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

BUPATI BANDUNG,

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

NO	MISI	TUJUAN	IKU	ALASAN/ SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak	Terwujudnya Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Ditentukan melalui 7 Dimensi, yaitu : Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Kebebasan Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kinerja pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan data yang berasal dari pembangunan kebudayaan nasional. Adapun Konsep Dimensi IPK dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dimensi 1 Ekonomi Budaya

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X1.1	Persentase perubahan 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan atau yang menjadikan kebudayaannya (ini sebagai sumber penghasilan.	0	1	Susenas MSBP

c. Cara Menghitung Nilai Dimensi

Nilai Pada Dimensi Ekonomi Budaya (D1) dapat dijumlah dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$D_1 = S_{11}$$

$$S_{11} = \frac{X_{11} - \min(X_{11})}{\max(X_{11}) - \min(X_{11})}$$

2. Dimensi 2 Pendidikan

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X2.1	Rata-rata lama sekolah (MYS) penduduk usia 25 tahun ke atas	0	15	Susenas KOR
X2.2	Harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas	0	18	Susenas KOR
X2.3	Angka Kesukaan Sekolah (ASS)	0	100	Susenas KOR
X2.4	Persentase rerata pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar materi ajar bahasa daerah dan/atau sikap/ bentuk)	0	15	Kemendikbud (DAPODIK)
X2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah	0	100	Susenas KOR

Gambar II.4 Penetapan IKU Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Indikator kinerja Tahun 2025 yang diperjanjikan, selain disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan target prioritas pembangunan daerah, juga diarahkan untuk mengoptimalkan capaian indikator program dan kegiatan prioritas urusan kebudayaan.

Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, mengingat pada periode sebelumnya urusan kebudayaan masih mengacu pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026, sementara pada periode berikutnya telah ditetapkan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 sebagai pedoman baru. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan kesinambungan program yang telah

berjalan, sekaligus penajaman fokus urusan kebudayaan agar pelaksanaan kinerja lebih terarah, terukur, dan berdampak.

Adapun indikator kinerja yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud diuraikan pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Disbudpar Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025 (Murni)
I	**Meningkatnya daya saing pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan melalui kolaborasi dan integrasi kearifan lokal, alam dan budaya di Kabupaten Bandung**	**Indeks Pembangunan Kebudayaan**	**52.00 Poin**
1	Meningkatnya kualitas pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan di kabupaten bandung	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	27%
II	**Meningkatnya Tatakelola Disbudpar**	• **Nilai LKIP Disbudpar** • **Persentase Aset Dalam Kondisi Baik**	• **81,00 Poin** • **93.25%**
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Disbudpar	• Nilai LKIP DISBUDPAR • Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	• 81,00 Poin • 93,25%

Sumber : Disbudpar, 2025

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025 (Perubahan)
I	**Terwujudnya Berkebudayaan Maju**	**Indeks Pembangunan Kebudayaan**	**56.27 Poin**
1	Meningkatkan Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda terhadap Pembangunan Daerah	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina	45,45%

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2025

2.4. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Anggaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun berdasarkan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan seiring pemekaran perangkat daerah, penganggaran tetap menjaga kesinambungan pelaksanaan Renstra Disbudpar Tahun 2021–2026, sekaligus mulai mengakomodasi arah kebijakan dan target kinerja dalam Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2025–2029. Adapun rincian rencana anggaran Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.7 Anggaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)
5	**BELANJA DAERAH**	**11.192.038.351,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.586.360.293,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	3.959.157.943,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.729.866.350,00
5.1.04	Belanja Hibah	897.336.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**605.678.058,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	368.998.558,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	216.392.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.287.500,00

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2025

Tabel II.8 Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2025

No	Program	Anggaran 2025 (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.300.250.451,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.118.589.900,00
3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	300.000.000,00
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	473.198.000,00
	JUMLAH	**11.192.038.351,00**

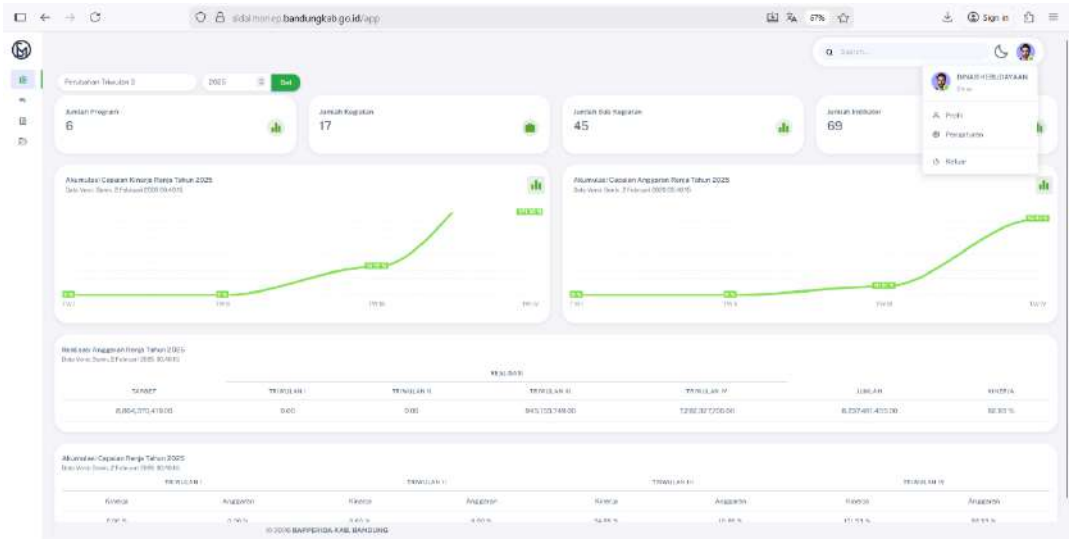
Sumber : Dinas Kebudayaan, 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

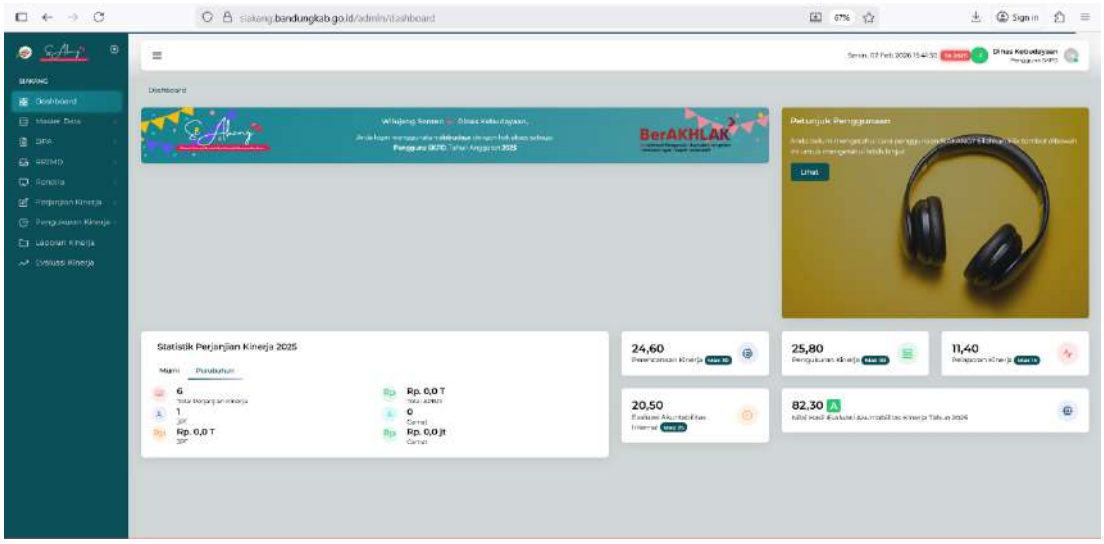
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung, pengukuran secara berkala (triwulan) dilaksanakan melalui Aplikasi Sistem Informasi Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIDALMONEP).



Gambar III.1 Dashboard Aplikasi SIDALMONEP

Sedangkan pengukuran kinerja secara tahunan dilakukan pada aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Bandung (SIAKANG) serta termuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung.



Gambar III.2 Dashboard Aplikasi SIAKANG

Capaian kinerja Tahun 2025 menggambarkan tingkat keberhasilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun anggaran. Pengukuran capaian sasaran dan indikator kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Rincian skala nilai peringkat kinerja terhadap capaian sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perhitungan persentase pencapaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, yaitu jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik. Sebagai perangkat daerah baru hasil pemekaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2025 merupakan periode transisi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pelaporan kinerja pada tahun ini tetap menjaga kesinambungan dengan Renstra Disbudpar Tahun 2021–2026, sekaligus mulai mengacu pada arah kebijakan dan prioritas dalam Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2025–2029. Kondisi transisi ini turut mempengaruhi penyesuaian target, strategi pelaksanaan, serta pemetaan indikator kinerja yang dilaporkan.

Secara keseluruhan rincian capaian kinerja pada Dinas Kebudayaan tahun 2025 sebagai berikut:

3.1.1. Tujuan : Terwujudnya Berkebudayaan Maju

Indikator : Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK mencakup 7 (tujuh) dimensi, yakni ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, literasi, dan kesetaraan gender. Melalui indikator-indikator tersebut, IPK dapat menggambarkan sejauh mana kebudayaan lokal terus berkembang dan mendapat perhatian di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Analisis capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai berikut :

1. Capaian Tahun 2025



Gambar III.3 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang **sangat baik**. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung berjalan semakin positif, baik dalam aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, maupun pembinaan kebudayaan lokal. Adapun capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Bandung pada tahun 2025 sangat baik dengan capaian kinerja 101,10% dari target yang sudah ditetapkan sebesar 56,27 Poin dan terealisasi sebesar 56,89 Poin.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Gambar III.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Dari segi realisasi, Indeks Pembangunan Kebudayaan meningkat 0,70% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 56,19 Poin dan tahun 2025 sebesar 56,89 Poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Indeks Pembangunan Kebudayaan menurun sebesar 8,59% dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 110,17% dan pada tahun 2025 sebesar 101,58%.

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis



Gambar III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra 2025-2029

Berdasarkan gambar di atas, dilihat dari persfektif perencanaan Jangka menengah, realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebesar 56,89 poin berada pada capaian 98,08% terhadap target Renstra sebesar 58,00 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja IPK Tahun 2025 telah bergerak menuju target jangka menengah periode 2025–2029, meskipun masih diperlukan penguatan program dan kegiatan agar capaian indikator dapat semakin optimal pada tahun berikutnya.



Gambar III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra 2021-2026

Apabila dibandingkan dengan target akhir pada dokumen Renstra periode sebelumnya (Renstra 2021–2026), realisasi IPK Tahun 2025 sebesar 56,89 poin telah melampaui target akhir Renstra sebesar 52,50 poin, dengan capaian sebesar 108,36%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan kebudayaan pada Tahun 2025 tidak hanya memenuhi target tahunan, namun juga telah berada di atas target jangka menengah pada Renstra periode sebelumnya.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/ provinsi/ kabupaten/kota



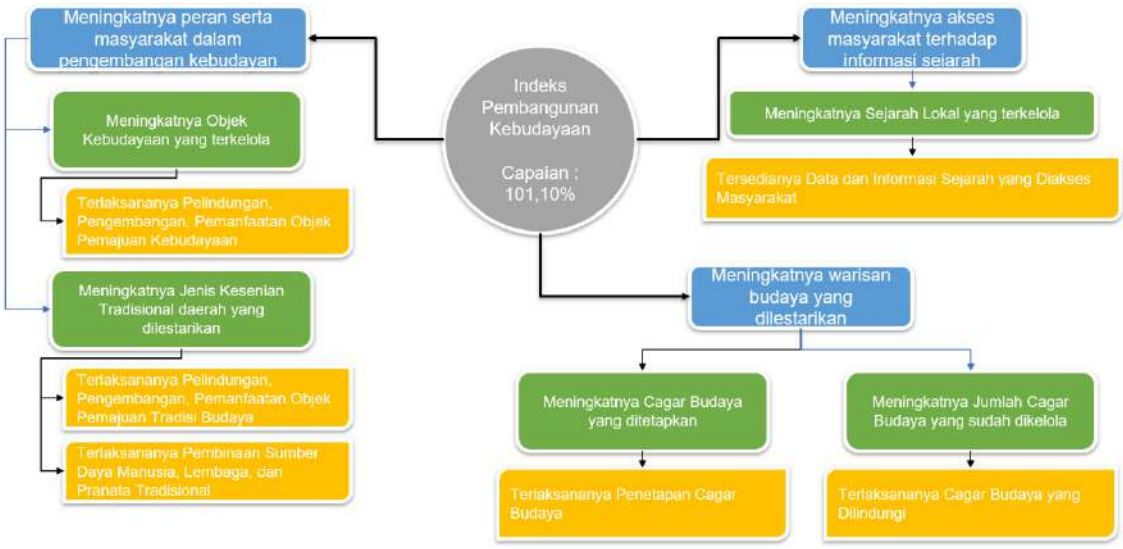
Gambar III.7 Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Berdasarkan gambar diatas, realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebesar 56,89 poin. Apabila dibandingkan dengan capaian IPK Nasional Tahun 2024 sebesar 59,98 poin, maka capaian IPK Kabupaten Bandung masih berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih sebesar 3,71 poin.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja pembangunan kebudayaan daerah telah melampaui target tahunan dan menunjukkan tren positif, masih diperlukan upaya penguatan pada aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan agar capaian IPK Kabupaten Bandung dapat semakin mendekati bahkan melampaui standar nasional pada periode berikutnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar III.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan

Secara keseluruhan, capaian **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)** sebesar **101,10%** dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu meningkatnya peran serta

masyarakat dalam pengembangan kebudayaan, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah, serta meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan. Ketiga faktor tersebut saling memperkuat dalam membangun ekosistem kebudayaan yang partisipatif, terkelola, dan berkelanjutan.

a. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan

   Kontribusi faktor ini tercermin dari Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi) sebesar 54,55%. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh objek pemajuan kebudayaan telah mendapatkan intervensi perlindungan dan pengelolaan secara aktif.

   - Meningkatnya Objek Kebudayaan yang Terkelola

     Upaya pengelolaan diwujudkan melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap 6 (enam) objek pemajuan kebudayaan. Intervensi ini menjadi bagian dari strategi penguatan dimensi ekspresi budaya dan ketahanan sosial budaya dalam IPK, karena mendorong keterlibatan komunitas dan pelaku budaya dalam pengelolaan objek kebudayaan.

   - Meningkatnya Jenis Kesenian Tradisional Daerah yang Dilestarikan

     Pelestarian kesenian tradisional menunjukkan perkembangan positif dengan dilestarikannya 2 (dua) jenis kesenian tradisional. Selain itu, terdapat 1 (satu) objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Upaya ini diperkuat melalui 9 (sembilan) laporan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional, yang menjadi indikator adanya penguatan kapasitas pelaku budaya dan kelembagaan adat. Pembinaan tersebut berkontribusi pada keberlanjutan tradisi serta memperkuat dimensi literasi budaya dan ketahanan sosial budaya.

b. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah

   Akses masyarakat terhadap informasi kesejarahan merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran identitas budaya daerah. Capaian pada faktor ini ditunjukkan oleh Persentase Sejarah Kabupaten Bandung yang terpelihara sebesar 5%, 1 (satu) sejarah lokal yang terkelola dan 2 (dua) dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat. Meskipun persentase sejarah yang terpelihara masih relatif terbatas, langkah pengelolaan dan penyediaan dokumen yang dapat diakses publik menjadi fondasi awal dalam penguatan dimensi literasi budaya dan warisan budaya dalam IPK. Dokumentasi dan publikasi sejarah daerah menjadi strategi penting dalam memperluas akses masyarakat di masa mendatang.

c. Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan

Pada aspek pelestarian warisan budaya, capaian ditunjukkan melalui Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan sebesar 20,95%.

- Meningkatnya Cagar Budaya yang Ditetapkan

  Persentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Bandung yang akan ditetapkan juga sebesar 20,95%, dengan jumlah 7 (tujuh) objek cagar budaya yang berhasil ditetapkan. Penetapan ini memberikan kepastian hukum serta menjadi dasar pengelolaan dan perlindungan lebih lanjut.

- Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola

  Dalam aspek pengelolaan dan perlindungan, jumlah objek cagar budaya yang telah dilindungi mencapai 87 (delapan puluh tujuh) objek. Capaian ini menunjukkan konsistensi pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjaga keberadaan dan keberlanjutan warisan budaya, sekaligus memperkuat dimensi warisan budaya dalam IPK.

Secara keseluruhan capaian IPK tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh kolaborasi lintas sektor yang berkontribusi terhadap 7 (tujuh) dimensi IPK, yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, literasi budaya, dan gender. Dengan demikian, capaian IPK sebesar 101,10% mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan kebudayaan yang terukur, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan kebudayaan lokal secara berkelanjutan.

Untuk mengakselerasi kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 56,31 Poin menjadi lebih besar dari 56,89 Poin. Hal ini didorong juga oleh realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2025 sebesar 56,89 Poin sudah melampaui target Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2026 sebesar 56,31 Poin.



Gambar III.9 Rekomendasi Penyesuaian Target Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2026

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar III.10 Upaya Perbaikan Peningkatan Kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2026

Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan meliputi :

1. Penguatan tata kelola pembangunan kebudayaan berbasis data dan indikator kinerja IPK;
2. Percepatan perlindungan dan penetapan warisan budaya daerah secara sistematis dan terencana;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan OPK secara berkelanjutan;
4. Penguatan kapasitas dan regenerasi pelaku, lembaga, serta pranata budaya;
5. Perluasan akses masyarakat terhadap literasi dan informasi kesejarahan daerah
6. Penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung 7 dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan;
7. Optimalisasi pemanfaatan budaya sebagai pengungkit ketahanan sosial dan ekonomi daerah;
8. Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi capaian kinerja kebudayaan secara periodik.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam upaya pencapaian indikator ini pada tahun 2025, telah didukung melalui berbagai program/kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.192.038.351,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 8.237.481.455,00 (73,60%). Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai berikut:

Tabel III.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Pembangunan Kebudayaan

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Terwujudnya Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan	101,10%	73,63%	26,37 %

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2025

Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2025 adalah 101,10% dengan realisasi anggaran Dinas Kebudayaan sebesar 73,63%. Dalam hal penggunaan sumber daya anggaran, terdapat **efisiensi** karena capaian kinerja lebih besar dari realisasi anggaran. Indikator kinerja ini sepenuhnya dalam kendali Dinas Kebudayaan, baik dari sisi intervensi, pelaksanaan kegiatan pendukung, pengukuran hasil serta sumber data utama.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan ditunjang oleh pelaksanaan 4 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.3 Program/Kegiatan yang menunjang Indeks Pembangunan Kebudayaan

Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				9.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
		4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
		5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				12.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				14.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				15.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
				17.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				18.	Penyediaan Bahan/Material
				19.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				20.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.	Pengadaan Mebel
				22.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				24.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				26.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				27.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		10.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	11.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		12.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				31.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
3.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	13.	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
4.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	14.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	33.	Penetapan Cagar Budaya
		15.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	34.	Pelindungan Cagar Budaya

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2025

Berikut dokumentasi kegiatan dalam mendukung pencapaian indikator tujuan Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2025 :





Pagelaran Seni Budaya “Baraya Bedas” di 9 Wilayah Kecamatan/Desa




Insentif BPJS Ketenagakerjaan bagi 4.000 Seniman Budayawan





Hibah Uang dan Alat kesenian kepada 29 Lembaga





Penetapan 4 Objek WBTb Tk. Provinsi dan 2 Objek WBTb Tk. Nasional




Penetapan 7 Objek Cagar Budaya dan Insentif bagi 87 Orang Juru Pelihara

Gambar III.11 Dokumentasi Program/ Kegiatan Penunjang Indeks Pembangunan Kebudayaan

Selanjutnya, penjabaran capaian kinerja masing-masing **indikator sasaran** Dinas Kebudayaan diuraikan sebagai berikut :

3.1.2. Sasaran : Meningkatkan Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda terhadap Pembangunan Daerah

Indikator : Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina

Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina diukur menggunakan rumusan/formulasi perhitungan :

$$\frac{Jumlah\ OPK\ yg\ dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan\ dan\ dibina}{Jumlah\ OPK\ yang\ terdata}\ x\ 100\%$$

Analisis capaian sebagai berikut :

1. Capaian Tahun 2025



Gambar III.12 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindung, dikembangkan, dmanfaatkan, dan dibina Tahun 2025

Kinerja Sasaran Strategis pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini tercermin dari realisasi indikator sasaran strategis Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina yang melampaui target yang telah ditetapkan. Target kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 45,45%, sedangkan realisasi mencapai 54,55%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 120,01%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Gambar III.13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Dari segi realisasi, Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina meningkat 27,27% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 27,27% dan tahun 2025 sebesar 54,55%. Adapun dari

aspek pencapaian kinerja, menurun sebesar 29,99% dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 150,00% dan pada tahun 2025 sebesar 120,01%.

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis



Gambar III.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Renstra 2025-2029

Berdasarkan gambar di atas, dilihat dari persfektif perencanaan Jangka menengah, realisasi Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina Tahun 2025 sebesar 54,55% berada pada capaian 85,71% terhadap target Renstra sebesar 63,64%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja indikator Tahun 2025 telah bergerak menuju target jangka menengah periode 2025–2029, meskipun masih diperlukan penguatan program dan kegiatan agar capaian indikator dapat semakin optimal pada tahun berikutnya.



Gambar III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Renstra 2021-2026

Apabila dibandingkan dengan target akhir pada dokumen Renstra periode sebelumnya (Renstra 2021–2026), realisasi Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina Tahun 2025 sebesar 54,55% telah melampaui target akhir Renstra sebesar 27,27%, dengan capaian sebesar 200,00%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja indikator pada Tahun 2025 tidak hanya memenuhi target tahunan, namun juga telah berada di atas target jangka menengah pada Renstra periode sebelumnya.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/ provinsi/ kabupaten/kota



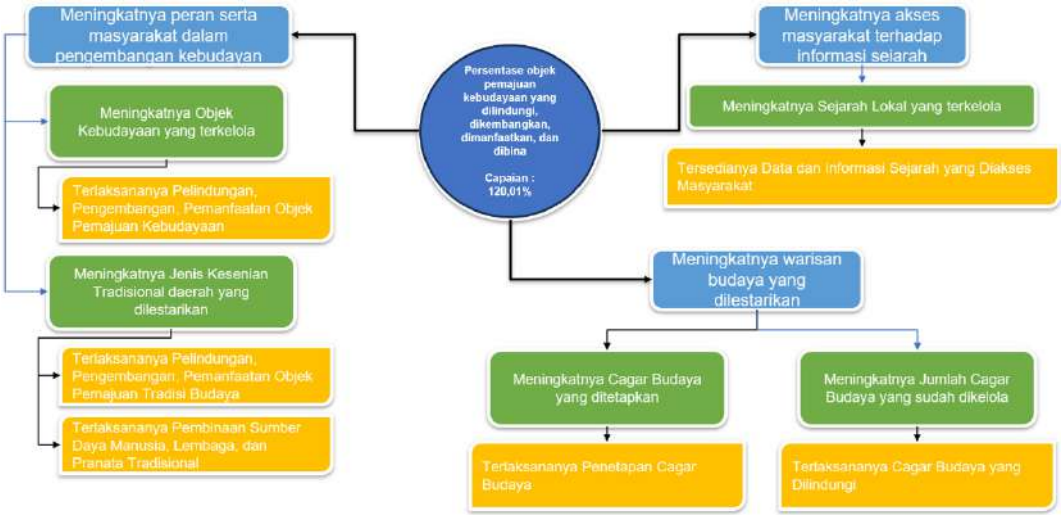
Gambar III.16 Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan gambar diatas, realisasi Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina Tahun 2025 sebesar 54,55%. Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebesar 56,53%, maka capaian Kabupaten Bandung masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dengan selisih sebesar 1,98%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja indikator daerah telah melampaui target tahunan dan menunjukkan tren positif, masih diperlukan upaya penguatan pada aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan agar capaian Kabupaten Bandung dapat semakin mendekati bahkan melampaui standar provinsi jawa barat pada periode berikutnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar III.17 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina

Kinerja indikator **Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina** pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini tercermin dari realisasi sebesar **54,55%** dibandingkan dengan target sebesar **45,45%**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **120,01%**. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan berjalan lebih optimal dari yang direncanakan.

Secara keseluruhan, capaian indikator sebesar 120,01% mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kebudayaan yang terarah dan berbasis kolaborasi. Faktor peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan akses informasi sejarah, serta konsistensi dalam penetapan dan perlindungan cagar budaya menjadi pendorong utama keberhasilan kinerja Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan dan kontribusi budaya daerah terhadap pembangunan semakin menguat dan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bandung secara berkelanjutan.

Untuk mengakselerasi kinerja Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina pada tahun 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 45,45% menjadi lebih besar dari 54,55%. Hal ini didorong juga oleh realisasi indikator tahun 2025 sebesar 54,55% sudah melampaui target Tahun 2026 sebesar 45,45%.



Gambar III.18 Rekomendasi Penyesuaian Target Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina Tahun 2026

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja **Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina** tahun 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar III.19 Upaya Perbaikan Kinerja Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina Tahun 2026

Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina meliputi:

1. Penguatan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM, komunitas, dan lembaga budaya
2. Optimalisasi perlindungan dan pengelolaan Cagar Budaya melalui pengawasan dan pendampingan teknis
3. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelestarian dan pemanfaatan budaya
4. Perluasan digitalisasi dan publikasi informasi sejarah serta objek budaya untuk meningkatkan akses masyarakat
5. Peningkatan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja terhadap capaian indikator secara berkala

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam upaya pencapaian indikator ini pada tahun 2025, telah didukung melalui berbagai program/kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.192.038.351,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 8.237.481.455,00 (73,60%). Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

Tabel III.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda terhadap Pembangunan Daerah	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindung, dikembangkan, dmanfaatkan, dan dibina	120,01%	73,63%	26,37 %

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2025

Capaian indikator kinerja Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindung, dikembangkan, dmanfaatkan, dan dibina pada tahun 2025 adalah 120,01% dengan realisasi anggaran Dinas Kebudayaan sebesar 73,63%. Dalam hal penggunaan sumber daya anggaran, terdapat **efisiensi** karena capaian kinerja lebih besar dari realisasi anggaran. Indikator kinerja ini sepenuhnya dalam kendali Dinas Kebudayaan, baik dari sisi intervensi, pelaksanaan kegiatan pendukung, pengukuran hasil serta sumber data utama.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian kinerja Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindung, dikembangkan, dmanfaatkan, dan dibina ditunjang oleh pelaksanaan 4 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.5 Program/Kegiatan yang Menunjang Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindung, dikembangkan, dmanfaatkan, dan dibina

Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				9.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
		4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
		5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				12.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				14.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				15.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				17.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				18.	Penyediaan Bahan/Material
				19.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				20.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
		7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.	Pengadaan Mebel
				22.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				24.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				26.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				27.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		10.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	11.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		12.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				31.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
3.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	13.	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
4.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	14.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	33.	Penetapan Cagar Budaya
		15.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	34.	Pelindungan Cagar Budaya

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2025

3.1.3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tanggal : 16 September 2025, Nomor : 700/753/Inspektorat, Perihal: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2025, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung telah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel III.6 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

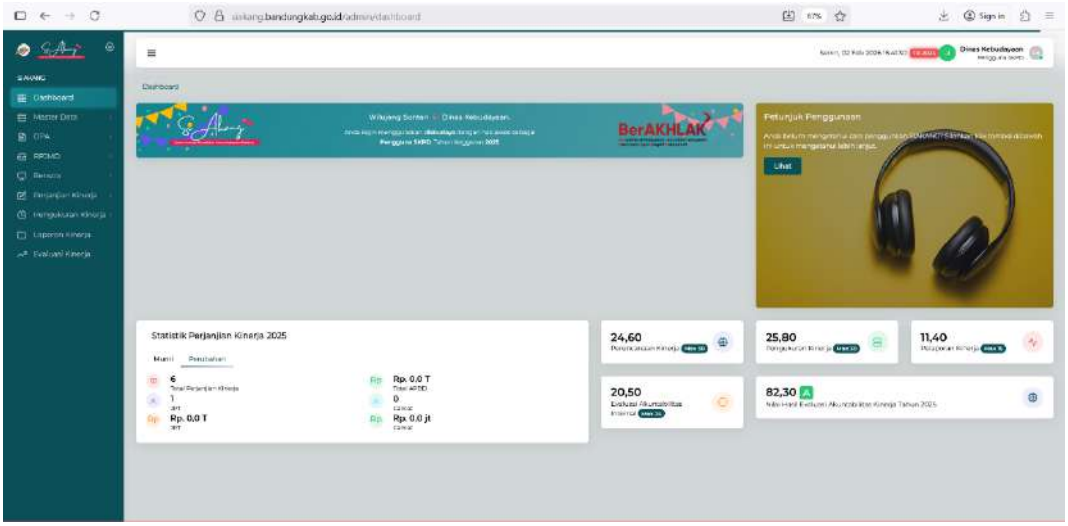
No	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian
1.	**Perencanaan *Kinerja***					
	a. Perbaikan prosedur Dokumen dan Publikasi : Agar seluruh dokumen diformalkan dan dipublikasikan melalui kanal resmi Kabupaten Bandung sesuai *timeline* (tepat waktu)	Dokumen perencanaan diformalkan dan dipublikasikan di website dinas dan tepat waktu	Diformalkannya dokumen perencanaan dan dipublikasikan tepat waktu	Bulan september-oktober 2025	Sekretariat	Selesai
2.	**Pelaporan Kinerja :**					
	a. Pemanfaatan : Melaksanakan sosialisasi internal SAKIP secara berkala guna meningkatkan pemahaman setiap pegawai terhadap tugas dan fungsinya	Pelaksanaan Sosialisasi SAKIP bagi Pegawai Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Sosialisasi SAKIP bagi Pegawai Dinas Kebudayaan	Oktober - November 2025	Sekretariat	Selesai
3.	**Evaluasi Akuntablitas Kinerja Internal :**					
	a. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk analisis data yang lebih mendalam guna mendukung pengambilan keputusan strategis	Pelaksanaan penggunaan teknologi informasi untuk analisis data	Terlaksananya penggunaan teknologi informasi untuk analisis data	September - Desember 2025	Sekretariat	Selesai

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2025

3.1.4. Instrumen/Inovasi Pendukung Capaian Kinerja 2025

1. SIAKANG

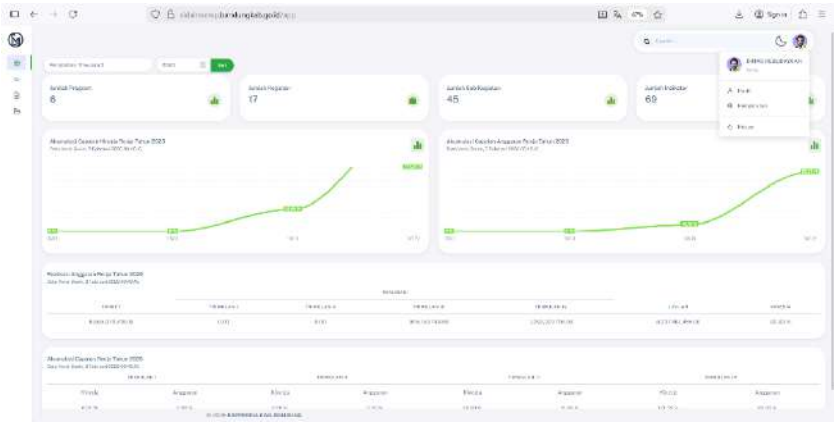
Instrumen pendukung penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah aplikasi https://siakang.bandungkab.go.id atau **Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Bandung (SIAKANG)** yang mengintegrasikan **perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja**



Gambar III.20 Tampilan Aplikasi SIAKANG

2. SIDALMONEP

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung selanjutnya adalah aplikasi http://sidalmonep.bandungkab.go.id/ atau **Sistem Informasi Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan** yang mengintegrasikan perencanaan dengan monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD di Kabupaten Bandung.

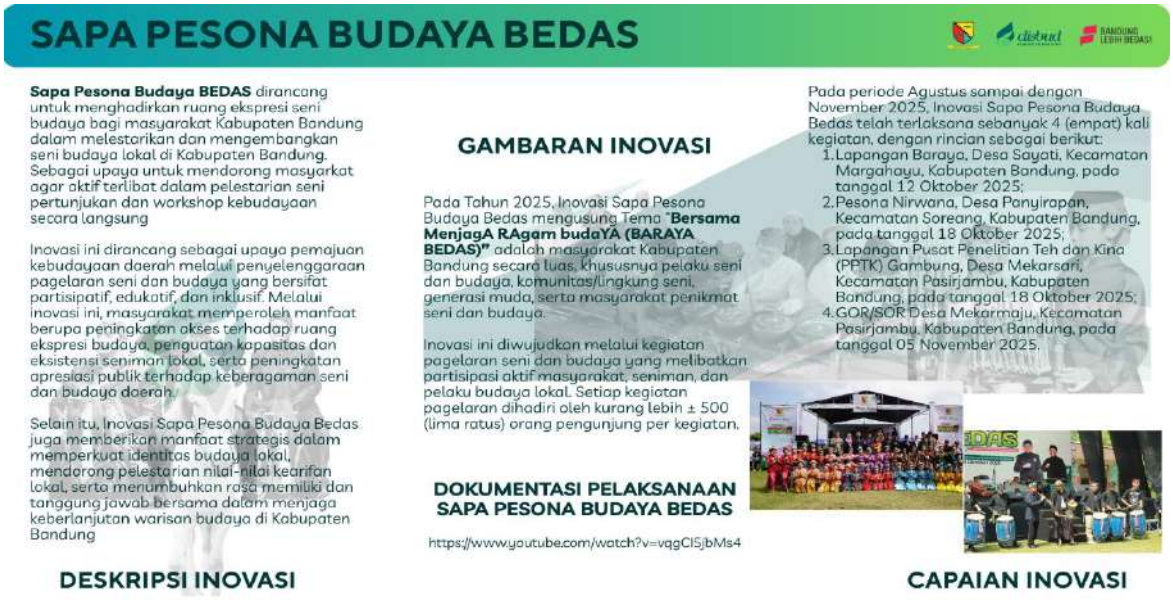


Gambar III.21 Tampilan Aplikasi Sidalmonep

3. SAPA PESONA BUDAYA BEDAS

Sapa Pesona Budaya BEDAS dirancang untuk menghadirkan ruang ekspresi seni budaya bagi masyarakat Kabupaten Bandung dalam melestarikan dan

mengembangkan seni budaya lokal di Kabupaten Bandung. Sebagai upaya untuk mendorong masyarkat agar aktif terlibat dalam pelestarian seni pertunjukan dan workshop kebudayaan secara langsung.



Gambar III.22 Alur Kegiatan SAPA PESONA BUDAYA BEDAS

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2025

3.2.1. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung tahun 2025 berdasarkan alokasi anggaran perubahan sebesar Rp 11.192.038.351,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.240.481.455,00 atau dengan serapan mencapai 73,62%. Untuk lebih jelasnya capaian realisasi anggaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.7 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	**BELANJA DAERAH**	**11.192.038.351,00**	**8.240.481.455,00**	**73,63**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.586.360.293,00**	**7.641.245.082,00**	**72,18**
5.1.01	Belanja Pegawai	3.959.157.943,00	1.365.961.932,00	34,50
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.729.866.350,00	5.382.559.800,00	93,94
5.1.04	Belanja Hibah	897.336.000,00	892.723.350,00	99.49
5.2	**BELANJA MODAL**	**605.678.058,00**	**599.236.373,00**	**98,94**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	368.998.558,00	366.360.671,00	99,29
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	216.392.000,00	212.618.202,00	98,26
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.287.500,00	20.257.500,00	99,85
	JUMLAH BELANJA	**11.192.038.351,00**	**8.240.481.455,00**	**95,57**

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2025

Berdasarkan tabel diatas, alokasi anggaran Dinas Kebudayaan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu (1) Belanja Operasi dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.586.360.293,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.641.245.082,00 atau 72,18%, (2) Belanja Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp 605.678.058,00 dengan realisasi sebesar Rp 599.236.373,00 atau 98,94%.

Untuk uraian lebih rinci mengenai realisasi anggaran program/ kegiatan/ sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.8 Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**11.192.038.351**	**8.240.481.455**	**73,63**
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**11.192.038.351**	**8.240.481.455**	**73,63**
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.300.250.451**	**4.622.147.205**	**63,31**
	2.22.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**18.172.180**	**18.160.000**	**99,93**
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.920.000	1.920.000	**100,00**
	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000	4.000.000	**100,00**
	2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000	4.000.000	**100,00**
	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	**100,00**
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.252.180	6.240.000	**99,81**
	2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.932.677.763**	**1.343.961.932**	**34,17**
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.932.157.943	1.343.461.932	**34,17**
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	519.820	500.000	**96,19**
	2.22.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**2.800.000**	**2.800.000**	**100,00**
	2.22.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	2.000.000	**100,00**
	2.22.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	800.000	800.000	**100,00**
	2.22.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**10.950.000**	**10.950.000**	**100,00**
	2.22.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.950.000	10.950.000	**100,00**
	2.22.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**76.279.300**	**76.027.100**	**99,67**
	2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.424.000	28.171.800	**99,11**
	2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47.855.300	47.855.300	**100,00**
	2.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**294.558.585**	**284.550.718**	**96,60**
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.250.000	38.544.639	**98,20**
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.996.410	117.616.963	**99,68**
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.401.200	7.296.252	**98,58**
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.500.000	2.269.184	**90,77**
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	82.121.700	74.225.030	**90,38**
	2.22.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	2.500.000	2.460.800	**98,43**
	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	5.000.000	**100,00**
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.789.275	37.137.850	**98,28**

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian (%)
	2.22.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**250.243.087**	**248.283.600**	**99,22**
	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	29.622.900	29.325.000	**98,99**
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220.620.187	218.958.600	**99,25**
	2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.786.735.606**	**1.736.921.023**	**97,21**
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.567.200	158.244.313	**78,12**
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.584.168.406	1.578.676.710	**99,65**
	2.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**900.833.930**	**877.992.832**	**97,46**
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.490.000	86.235.000	**88,46**
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.070.000	71.501.700	**95,25**
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	728.273.930	720.256.132	**98,90**
	2.22.01.2.11	**ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**	**27.000.000**	**22.500.000**	**83,33**
	2.22.01.2.11.0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	27.000.000	22.500.000	**83,33**
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**3.118.589.900**	**2.890.963.250**	**92,70**
	2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.867.501.000**	**1.783.471.800**	**95,50**
	2.22.02.2.01.001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.867.501.000	1.783.471.800	**95,50**
	2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.251.088.900**	**1.107.491.450**	**88,52**
	2.22.02.2.02.001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	108.399.200	105.352.200	**97,19**
	2.22.02.2.02.002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1.142.689.700	1.002.139.250	**87,70**
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**300.000.000**	**299.544.500**	**99,85**
	2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**300.000.000**	**299.544.500**	**99,85**
	2.22.02.2.01.003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	300.000.000	299.544.500	**99,85**
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**473.198.000**	**427.826.500**	**90,41**
	2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**166.133.700**	**166.133.300**	**100,00**
	2.22.05.2.01.002	Penetapan Cagar Budaya	166.133.700	166.133.300	**100,00**
	2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**307.064.300**	**261.693.200**	**85,22**
	2.22.05.2.01.001	Pelindungan Cagar Budaya	307.064.300	261.693.200	**85,22**

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2025

Selain faktor efisiensi belanja dan penyesuaian teknis pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran Tahun 2025 juga dipengaruhi oleh kebijakan optimalisasi penghematan belanja sebagaimana tertuang dalam Instruksi Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2025 tentang

Optimalisasi Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025.

Melalui instruksi tersebut, seluruh perangkat daerah diwajibkan melaksanakan pemblokiran mandiri (*self blocking*) terhadap sebagian alokasi anggaran belanja yang dapat dihemat, dengan tetap menjaga capaian target kinerja outcome dan output program/kegiatan prioritas daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, memastikan efektivitas penggunaan anggaran, serta menjaga stabilitas fiskal daerah.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung melakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama. Meskipun terdapat sisa anggaran sebagai konsekuensi dari kebijakan penghematan tersebut, capaian kinerja perangkat daerah tetap dapat memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, sisa anggaran pada Tahun 2025 tidak sepenuhnya mencerminkan rendahnya serapan, melainkan merupakan bagian dari kebijakan pengendalian dan optimalisasi belanja daerah yang tetap berorientasi pada pencapaian hasil (*result oriented budgeting*).

Beberapa faktor yang mendukung capaian realisasi anggaran Dinas Kebudayaan tahun 2025, antara lain :

a. Komitmen yang tinggi dari para pimpinan terhadap capaian serapan anggaran melalui kegiatan pemantauan yang cukup intensif dan berkala guna memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan tepat waktu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan lebih akurat serta memperhatikan indikator-indikator yang berpengaruh terhadap capaian kinerja pelaksanaan anggaran;
c. Responsif terhadap segala perubahan situasi termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Bandung; dan
d. Koordinasi antar bidang dan seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Dinas Kebudayaan yang berjalan cukup baik.

Namun demikian, dalam upaya mencapai realisasi anggaran, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan, antara lain:

a. Adanya kebijakan efisiensi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sehingga ada beberapa belanja yang tidak dapat direalisasikan;
b. Belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi kegiatan maupun belanja yang berpotensi dapat diakselerasi dan dilaksanakan percepatan penyerapan;
c. Belum optimalnya pemahaman para pengelola anggaran, terhadap indikator-indikator yang dapat mempengaruhi capaian kinerja pelaksanaan anggaran.

Dalam menghadapi berbagai kendala yang ditemui, berikut beberapa strategi yang dapat ditempuh sebagai upaya melakukan perbaikan serta mengoptimalisasi proses pelaksanaan anggaran pada Dinas Kebudayaan dan menjadi bahan perbaikan ditahun berikutnya:

a. Menyusun rencana kegiatan dan proyeksi pencairan anggaran secara lebih akurat, dan senantiasa mempedomani rencana yang telah disusun tersebut;
b. Menyusun skala prioritas pelaksanaan kegiatan;
c. Mendorong agar pengelola anggaran untuk mengoptimalkan pencapaian realisasi anggaran yang dapat mendorong/ meningkatkan pencapaian indikator kinerja.

3.3. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dari berbagai tingkat capaian indikator dan anggaran yang telah dihasilkan, pada tahun 2025 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung mendapatkan berbagai piagam penghargaan dan apresiasi dari berbagai instansi. Berikut adalah piagam penghargaan yang diperoleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung tahun 2025 :

1. **Tingkat Nasional**
   a. **Penetapan Warisan Budaya Takbenda Kabupaten Bandung**



Dua Karya Budaya Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Nasional pada tahun 2025. Karya Budaya yang ditetapkan yaitu Borondong Ketan Ibun dan Mapag Ménak. Penetapan ini bertujuan untuk melestarikan kearifan lokal, memperkuat identitas budaya Kabupaten Bandung.

2. **Tingkat Provinsi Jawa Barat**
   a. **Festival Permainan Rakyat Jawa Barat 2025**





Kabupaten Bandung menjadi Peserta Terpilih dalam kegiatan Festival Permainan Rakyat Jawa Barat Tahun 2025, hal ini menunjukkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan permainan rakyat sebagai bagian dari objek pemajuan kebudayaan. Keikutsertaan tersebut juga mencerminkan kualitas pembinaan serta penguatan kapasitas komunitas budaya di daerah, sehingga mampu bersaing dan memperoleh pengakuan di tingkat Provinsi Jawa Barat.

b. Penetapan Warisan Budaya Takbenda Kabupaten Bandung



Selanjutnya, Dua Karya Budaya Kabupaten Bandung lainnya, ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Tingkat Provinsi Jawa Barat bersamaan dengan pelaksanan Pekan Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Barat. Karya Budaya yang dimaksud yaitu, Rujak Ciherang dan Opak Linggar Rancaekek.

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan menyajikan evaluasi capaian kinerja, kendala, solusi, dan tindak lanjut atas kinerja sasaran yang tertuang dalam IKU. Secara umum evaluasi capaian kinerja Dinas Kebudayaan tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, yaitu dengan tercapainya seluruh Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Perbandingan antara capaian IKU dengan kinerja keuangan diperoleh hasil yang **baik dan efisien**.

1. **Hasil evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :**

   Indikator Tujuan :

   Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) memiliki target 56,27 Poin, dengan realisasi 56,89 Poin atau tercapai 101,10%.

   Indikator Sasaran :

   Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindung, dikembangkan, dmanfaatkan, dan dibina memiliki target 45,45%, dengan realisasi 54,55% atau tercapai 120,01%.

   Kemudian jika dilihat berdasarkan realisasi anggaran Dinas Kebudayaan di tahun 2025 mencapai 73,63%. Selain faktor efisiensi belanja dan penyesuaian teknis pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran Tahun 2025 juga dipengaruhi oleh kebijakan optimalisasi penghematan belanja sebagaimana tertuang dalam Instruksi Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025.

2. **Kendala atau Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja diantaranya :**
   a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) : SDM yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kebudayaan juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program.
   b. Kurangnya Koordinasi Antar-Sektor : Koordinasi antar-sektor dan antar-instansi terkait di tingkat Kabupaten Bandung masih perlu ditingkatkan.
   c. Monitoring dan Evaluasi yang belum Optimal : pelaksanaan monitoring dan evaluasi sering kali tidak dilakukan secara berkala dan terstruktur, sehingga hasil evaluasi tidak dapat segera digunakan untuk perbaikan program.

Adanya kendala atau permasalahan yang menjadi penghambat pencapaian kinerja akan menjadi fokus perbaikan perencanaan kinerja yang akan dihadapi di tahun berikutnya.

4.2 LANGKAH-LANGKAH DIMASA MENDATANG YANG AKAN DILAKUKAN

Berdasarkan analisis capaian kinerja sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan di tahun berikutnya, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan berbasis data yang akurat;
2. Mempercepat proses penetapan dan penguatan perlindungan Cagar Budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya daerah;
3. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia, lembaga, dan komunitas budaya melalui pembinaan yang berkelanjutan;
4. Mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah serta kemitraan dengan akademisi, komunitas, dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan kebudayaan;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala atas program/kegiatan, terutama program/kegiatan prioritas Bupati dan program-program lainnya pada Dinas Kebudayaan, untuk memastikan berjalan *on the track*, tepat sasaran, tepat waktu, dan bermaanfaat;
6. Menjadikan capaian kinerja tahun 2025 sebagai dasar evaluasi terutama untuk target kinerja yang belum tercapai agar lebih optimal di tahun selanjutnya.

Laporan kinerja ini dapat menjadi bahan informasi dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kebudayaan kedepan. Lebih lanjut juga menjadi dasar guna peningkatan capaian kinerja di tahun berikutnya.



Orang sukses itu
henteu ujug-ujug sukses,
aya proses panjang
nu kudu dilakonan,
pinuh ku usaha, sabar
jeung perjuangan

Dr. H.M, Dadang Supriatna, S.Ip, M.Si

BUPATI BANDUNG

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km.17 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat,
Telp/Fax. 022-85871 E-mail : disbud@bandungkab.go.id.
Website : www.disbud.bandungkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Soreang, 20 Februari 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

IRVAN AHMAD S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197109031999031009

KERTAS KERJA REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan Telah menyajikan akuntablitas keuangan	√
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-

No	Pernyataan		Check list
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10. IKU dan IK telah SMART	√

LEMBAR REVIU LKIP 2025
SEKRETARIS DINAS ATAS DRAFT LAPORAN KINERJA PD

No	Uraian Permasalahan	Penyelesaian	Paraf
1.	Beberapa indikator kinerja belum dilengkapi analisis capaian (perbandingan target dan realisasi).	Telah dilengkapi analisis capaian, faktor pendukung dan penghambat.	
2.	Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja belum tergambar jelas.	Ditambahkan analisis perbandingan antara realisasi anggaran dan tingkat capaian kinerja.	
3.	Data dukung capaian indikator belum dicantumkan secara eksplisit dalam tabel.	Ditambahkan kolom sumber data dan keterangan pendukung capaian.	

Soreang, 20 Februari 2026

Ketua Tim Penyusun LKIP
Sekretaris Dinas Kebudayaan

AGUS ISMAIL DANUNINGRAT, ST.,MM.
Pembina Tk. I
NIP.19720808 200501 1 009

Sekretaris Tim Penyusunan LKIP
Perencana Ahli Pertama

FADLY MUHAMMAD TRIVALDE, S.E
Penata Muda TK.I
NIP.19941204 201903 1 002

LEMBAR REVIU LKIP 2025
KEPALA PD ATAS DRAFT LAPORAN KINERJA PD

No	Uraian Permasalahan	Penyelesaian	Paraf
1.	Perbandingan capaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya belum tergambar komprehensif.	Ditambahkan tabel tren capaian kinerja 2–3 tahun terakhir.	
2.	Hubungan antara kinerja program dan kontribusi terhadap visi kepala daerah belum ditegaskan.	Ditambahkan penjelasan kontribusi terhadap RPJMD dan visi kepala daerah.	
3.	Kesimpulan akhir belum menegaskan tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Disempurnakan dengan pernyataan tingkat capaian kinerja dan komitmen perbaikan berkelanjutan.	

Soreang, 20 Februari 2026

Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bandung

IRVAN AHMAD, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19710903 199903 1 009

Ketua Tim Penyusunan LKIP
Sekretaris Dinas Kebudayaan

AGUS ISMAIL DANUNINGRAT, ST.,MM.
Pembina Tk. I
NIP.19720808 200501 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEBUDAYAAN
Jl. Raya Soreang Km.17 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat,
Telp/Fax. 022-85871 E-mail : disbud@bandungkab.go.id.
Website : www.disbud.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 000.8.6.3/869/Sekre/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/ 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing –masing;
b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Bandung Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6055);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008

Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 65);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Tujuan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian kinerja di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal : 25 September 2025

A.n BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,

IRVAN AHMAD S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197109031999031009

Tembusan, disampaikan kepada:
Yth. 1. Bupati Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Lampiran : 1 (satu) lembar
Nomor : 000.8.6.3/869/Sekre/2025
Tanggal : 25 September 2025
Hal : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Kerja : Dinas Kebudayaan
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
3. Fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
   b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang terkait dengan kebudayaan;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional untuk pengembangan, pelestarian, dan pemajuan kebudayaan daerah;
   d. pengelolaan administrasi dinas secara menyeluruh dan akuntabel; serta
   e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangan yang berlaku
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	MISI	TUJUAN	IKU	ALASAN/ SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak	Terwujudnya Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Ditentukan melalui 7 Dimensi, yaitu : Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Kebebasan Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. Adapun Konsep Dimensi IPK dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dimensi 1 Ekonomi Budaya

a. Definisi Operasional : Aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

b. Rincian Indikator dan Sumber Data :

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X1.1	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0	1	Susenas MSBP

c. Cara Menghitung Nilai Dimensi

Nilai Pada Dimensi Ekonomi Budaya (D1) dapat diperoleh dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$D_1 = S_{1.1}$$

$$S_{1.1} = \frac{X_{1.1} - min(X_{1.1})}{max(X_{1.1}) - min(X_{1.1})}$$

2. Dimensi 2 Pendidikan

a. Definisi Operasional : Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang Seni, Budaya, dan Bahasa

b. Rincian Indikator dan Sumber Data :

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X2.1	Rata-rata Lama Sekolah (MYS) penduduk usia 25 tahun ke atas	0	15	Susenas KOR
X2.2	Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas	0	18	Susenas KOR
X2.3	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)	0	100	Susenas KOR
X2.4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	0	45	Kemendikbud (DAPODIK)
X2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah	0	100	Susenas KOR

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X2.6	Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah	0	100	Susenas KOR

c. Cara Menghitung Nilai Dimensi

Nilai Pada Dimensi Pendidikan (D2) dapat diperoleh dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$D_2=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} S_{2.i}=\frac{S_{2.1}+S_{2.2}+S_{2.3}+S_{2.4}+S_{2.5}+S_{2.6}}{6}$$

$$S_{2.i}=\frac{X_{2.i}-min(X_{2.i})}{max(X_{2.i})-min(X_{2.i})},i=1,2,3,4,5,6$$

3. Dimensi 3 Ketahanan Sosial Budaya

a. Defisini Operasional : Ketahanan Sosial Budaya Ketahanan Sosial Budaya dalam konteks penyusunan IPK didefinisikan sebagai kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat.

b. Rincian Indikator dan Sumber Data :

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	0	100	Susenas MSBP
X3.2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	0	100	Susenas MSBP
X3.3	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama.	0	100	Susenas MSBP
X3.4	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman	0	100	Susenas MSBP

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
	dengan orang lain yang berbeda suku.			
X3.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir	0	100	Susenas MSBP
X3.6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong	0	100	Susenas MSBP
X3.7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari	0	50	Susenas Hansos/SPTK
X3.8	Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga	0	100	Susenas Hansos/SPTK

c. Cara Menghitung Nilai Dimensi

Nilai Pada Dimensi Ketahanan Sosial Budaya (D3) dapat diperoleh dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$D_3=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8} S_{3.i}=\frac{S_{3.1}+S_{3.2}+S_{3.3}+S_{3.4}+S_{3.5}+S_{3.6}+S_{3.7}+S_{3.8}}{8}$$

$$S_{3.i}=\frac{X_{3.i}-min\left(X_{3.i}\right)}{max\left(X_{3.i}\right)-min\left(X_{3.i}\right)},i=1,2,3,4,5,6,7,8$$

4. Dimensi 4 Warisan Budaya

a. Definisi Operasional : Upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya

b. Rincian Indikator dan Sumber Data :

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	0	50	Kemendikbud (DAPOBUD)
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	0	50	Kemendikbud (DAPOBUD)

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X4.3	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	0	100	Susenas MSBP
X4.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir.	0	100	Susenas MSBP
X4.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir	0	30	Susenas MSBP
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir	0	95	Susenas MSBP

c. Cara Menghitung Nilai Dimensi

Nilai Pada Dimensi Warisan Budaya (D4) dapat diperoleh dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$D_4 = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} S_{4.i} = \frac{S_{4.1}+S_{4.2}+S_{4.3}+S_{4.4}+S_{4.5}+S_{4.6}}{6}$$

$$S_{4.i} = \frac{X_{4.i} - min\left(X_{4.i}\right)}{max\left(X_{4.i}\right) - min\left(X_{4.i}\right)}, i = 1,2,3,4,5,6$$

5. Dimensi 5 Ekspresi Budaya

a. Definisi Operasional : Segala aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat.

b. Rincian Indikator dan Sumber Data :

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X5.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama setahun terakhir	0	30	Susenas MSBP
X5.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam setahun terakhir	0	20	Susenas MSBP
X5.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah	0	7	Susenas MSBP

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
	terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir			
X5.4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	0	45	Susenas MSBP

c. Cara Menghitung Nilai Dimensi

Nilai Pada Dimensi Ekspresi Budaya (D5) dapat diperoleh dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$D_5=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} S_{5.i}=\frac{S_{5.1}+S_{5.2}+S_{5.3}+S_{5.4}}{4}$$

$$S_{5.i}=\frac{X_{5.i}-min\left(X_{5.i}\right)}{max\left(X_{5.i}\right)-min\left(X_{5.i}\right)},i=1,2,3,4$$

6. Dimensi 6 Budaya Literasi

a. Definisi Operasional : Aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan Masyarakat.

b. Rincian Indikator dan Sumber Data :

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam seminggu terakhir	0	70	Susenas MSBP
X6.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	0	85	Susenas Kor
X6.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir	0	25	Susenas MSBP

c. Cara Menghitung Nilai Dimensi

Nilai Pada Dimensi Budaya Literasi (D6) dapat diperoleh dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$D_6=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} S_{6.i}=\frac{S_{6.1}+S_{6.2}+S_{6.3}}{3}$$

$$S_{6.i}=\frac{X_{6.i}-min\left(X_{6.i}\right)}{max\left(X_{6.i}\right)-min\left(X_{6.i}\right)},i=1,2,3$$

7. Dimensi 7 Gender

a. Definisi Operasional : Persamaan hak, tanggung jawab dan peluang yang setara antara perempuan dan laki-laki di ruang publik untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pembangunan.

b. Rincian Indikator dan Sumber Data :

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki	0	100	Sakernas
X7.2	Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	0	100	Susenas Kor
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	0	100	KPU;BPS

c. Cara Menghitung Nilai Dimensi

Nilai Pada Dimensi Gender (D7) dapat diperoleh dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$D_7 = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} S_{7.i} = \frac{S_{7.1} + S_{7.2} + S_{7.3}}{3}$$

$$S_{7.i} = \frac{X_{7.i} - min(X_{7.i})}{max(X_{7.i}) - min(X_{7.i})}, i = 1,2,3$$

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal : 25 September 2025

A.n BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,

IRVAN AHMAD S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197109031999031009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: IRVAN AHMAD,SE, MM
Jabatan	: KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama	: Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip., M.Si
Jabatan	: BUPATI BANDUNG
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kineqa jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Soreang, 25 September 2025

PIHAK KEDUA

Dr. H.M. DADANG SUPRIATNA, S.ipi, M.Si

PIHAK PERTAMA,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS KEBUDAYAAN

IRVAN AHMAD,SE , MM
Pembina TK. I
NIP. 197109031999031009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	**Terwujudnya Berkebudayaan Maju**	• **Indeks Pembangunan Kebudayaan**	• **56.00 Poin**
001	Meningkatkan Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda terhadap Pembangunan Daerah	• Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina	• 45.00 %

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.300.250.451,00	APBD-P
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.118.589.900,00	APBD-P
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0,00	APBD-P
4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	300.000.000,00	APBD-P
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	473.198.000,00	APBD-P
	TOTAL	**11.192.038.351,00**	

Berkomitmen menghasilkan minimal satu jenis inovasi baru dalam rangka meningkatkan Indeks Inovasi Daerah dan Percepatan pencapaian target program strategis Bupati.

Soreang, 25 September 2025

BUPATI BANDUNG,

Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip , M.Si

PIHAK PERTAMA,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS KEBUDAYAAN

IRVAN AHMAD,SE, MM
Pembina TK. I
NIP. 197109031999031009

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEBUDAYAAN
Jl. Raya Soreang Km.17 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat,
Telp/Fax. 022-85871 E-mail : disbud@bandungkab.go.id.
Website : www.disbud.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 500.10.30.2/821/DISBUD/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DINAS,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, dan akselerasi pemajuan kebudayaan daerah, perlu dilakukan pengembangan dan penerapan inovasi di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung;
b. bahwa bentuk inovasi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Pasal 4, antara lain terdiri dari Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi lainnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung tentang Penetapan Inovasi di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6055);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang

Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan inovasi di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai inovasi yang disahkan untuk diimplementasikan;

KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil pengembangan dari pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efektivitas program, dan kinerja organisasi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal : 19 September 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN



IRVAN AHMAD S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197109031999031009

Tembusan, disampaikan kepada:
Yth. 1. Bupati Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Bandung.

Lampiran : 1 (satu) lembar
Nomor : 500.10.30.2/821/DISBUD/2025
Tanggal : 19 September 2025
Hal : Penetapan Inovasi di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung

INOVASI DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA INOVASI	KATEGORI INOVASI	TAHUN INOVASI DIMULAI	PENANGGUNG JAWAB
1.	SADAYA BEDAS (Sistem Aplikasi Database Kebudayaan Bedas)	Inovasi Program dan Pelayanan Publik	2025	Sekretariat
2.	SAPA PESONA BUDAYA BEDAS	Inovasi Program dan Pelayanan Publik	2025	Bidang Pengembangan Kebudayaan
3.	M.D.S (Museum Digital Sejarah) Kabupaten Bandung	Inovasi Program dan Pelayanan Publik	2025	Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya dan Museum

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal : 19 September 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

IRVAN AHMAD S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197109031999031009

POHON KINERJA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

MISI-1
Meningkatkan sumber daya manusia berahlak dan berkarakter dengan didukung keberpihakan penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perindungan bagi anak

TUJUAN RPJMD
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak, dan Berdaya Saing
IK: Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)

SASARAN RPJMD
Meningkatnya Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda
IK: Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)
Pengampu: Bupati Bandung

TUJUAN RENSTRA
CROSSCUTTING: Disparekraf, Disdik, Kesbangpol, DPMD, Dispusip, Diskominfo, Daldukppa, Setwan, Disnaker, Disdukcapil

Terwujudnya Berkebudayaan Maju
IK: Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)
DO: Ditentukan melalui 7 Dimensi, yaitu: Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Kebebasan Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender
Pengampu: Kepala Dinas Kebudayaan

SASARAN RENSTRA
CROSSCUTTING: Disparekraf, Disdik, Kesbangpol, DPMD, Dispusip, Diskominfo, Daldukppa, Setwan, Disnaker, Disdukcapil

Meningkatkan Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda terhadap Pembangunan Daerah
IK: Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina
DO: (Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina / Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang terdata) *100%
Pengampu: Kepala Dinas Kebudayaan

SASARAN PROGRAM 1
CROSSCUTTING: Disparekraf, Disdik, Kesbangpol, DPMD, Dispusip, Diskominfo, Daldukppa, Setwan, Disnaker, Disdukcapil

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayan
IK: Tingkat Partisispasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan
DO: (Jumlah partisipasi masyarakat terhadap objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi tahun N/ Jumlah partisipasi masyarakat terhadap objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi tahun N-1) x 100%
Nama Program: Program Pengembangan Kebudayaan
Pengampu: Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan

SASARAN KEGIATAN 1
Meningkatnya Objek Kebudayaan yang terkelola
IK: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan
DO: Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang terlestarikan
Nama Kegiatan: Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Pengampu: Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan

SASARAN SUB KEGIATAN 1
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
IK: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Nama Sub Kegiatan: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 2
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
IK: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Nama Sub Kegiatan: Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 3
Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota
IK: Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan
Nama Sub Kegiatan: Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN KEGIATAN 2
Meningkatnya Jenis Kesenian Tradisional daerah yang dilestarikan
IK: Persentase Jumlah Jenis Kesenian Tradisional daerah yang dilestarikan
DO: (Jumlah Jenis Kesenian Tradisional daerah yang dilestarikan / Jumlah Jumlah Jenis Kesenian Tradisional daerah yang terdata) x 100%
Nama Kegiatan: Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengampu: Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan

SASARAN SUB KEGIATAN 1
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
IK: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
Nama Sub Kegiatan: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 2
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
IK: Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
Nama Sub Kegiatan: Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 3
Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
IK: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan
Nama Sub Kegiatan: Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN PROGRAM 2
CROSSCUTTING: Disparekraf, Disdik, DPMD, Kecamatan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
IK: Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan
DO: (Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan/ Jumlah kesenian tradisional terdata) x 100%
Nama Program: Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Pengampu: Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan Kebudayaan

SASARAN KEGIATAN 1
Meningkatnya lembaga dan pelaku kesenian yang aktif dan terbina
IK: Jumlah lembaga atau pelaku kesenian tradisional yang terdata dan tervalidasi
DO: Jumlah lembaga atau pelaku kesenian tradisional yang terdata dan tervalidasi
Nama Kegiatan: Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengampu: Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan Kebudayaan

SASARAN SUB KEGIATAN 1
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
IK: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)
Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
Pengampu: Kepala Sub Bagian TU UPTD PKPK / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 2
Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
IK: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi
Nama Sub Kegiatan: Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
Pengampu: Kepala Sub Bagian TU UPTD PKPK / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 3
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
IK: Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
Pengampu: Kepala Sub Bagian TU UPTD PKPK / Ketua Tim

SASARAN PROGRAM 3
CROSSCUTTING: Disdik, DPMD, Kecamatan, Desa

Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi seiarah
IK: Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal
DO: (Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal tahun N / Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal Target 5 Tahun) x 100%
Nama Program: Program Pembinaan Sejarah
Pengampu: Kepala Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya dan Museum

SASARAN KEGIATAN 1
Meningkatnya Sejarah Lokal yang terkelola
IK: Jumlah Sejarah Lokal yang tercatat dan terdokumentasikan
DO: Jumlah Sejarah Lokal yang tercatat dan terdokumentasikan
Nama Kegiatan: Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Pengampu: Kepala Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya dan Museum

SASARAN SUB KEGIATAN 1
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
IK: Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan
Nama Sub Kegiatan: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 2
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
IK: Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 3
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat
IK: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat
Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN PROGRAM 4
CROSSCUTTING: Disdik, DPMD, Kecamatan, Desa

Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan
IK: Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan
DO: (Jumlah cagar budaya tingkat kabupaten yang ditetapkan/ jumlah objek diduga cagar budaya) x 100%
Nama Program: Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Pengampu: Kepala Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya dan Museum

SASARAN KEGIATAN 1
Meningkatnya Cagar Budaya yang ditetapkan
IK: Persentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang akan ditetapkan
DO: (Jumlah cagar budaya tingkat kabupaten yang ditetapkan / jumlah objek diduga cagar budaya) x 100%
Nama Kegiatan: Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Pengampu: Kepala Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya dan Museum

SASARAN SUB KEGIATAN 1
Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
IK: Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan
Nama Sub Kegiatan: Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 2
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya
IK: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan
Nama Sub Kegiatan: Penetapan Cagar Budaya
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 3
Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda
IK: Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan
Nama Sub Kegiatan: Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN KEGIATAN 2
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang sudah dikelola
IK: Jumlah Cagar Budaya yang pelihara
DO: Jumlah Cagar Budaya yang pelihara
Nama Kegiatan: Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Pengampu: Kepala Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya dan Museum

SASARAN SUB KEGIATAN 1
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi
IK: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi
Nama Sub Kegiatan: Pelindungan Cagar Budaya
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 2
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya
IK: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan
Nama Sub Kegiatan: Pengembangan Cagar Budaya
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 3
Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya
IK: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan
Nama Sub Kegiatan: Pemanfaatan Cagar Budaya
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN PROGRAM 5
CROSSCUTTING: Disparekraf, Dispusip, Disdik, Kecamatan, Desa

Meningkatnya tata kelola museum
IK: Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum
DO: (Pengunjung museum /Jumlah kunjungan wisatawan budaya) x 100%
Nama Program: Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Pengampu: Kepala Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya dan Museum

SASARAN KEGIATAN 1
Meningkatnya Jumlah museum sejarah Daerah yang terbangun
IK: Presentase Pendirian Museum Daerah yang terbangun
DO: (Progres Pembangunan Museum (Kajian materi, DED, Perencanaan, Pengawasan Fisik, Penyediaaan Sarana, Pemeliharaan) /Jumlah kunjungan wisatawan budaya) x 100%
Nama Kegiatan: Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
Pengampu: Kepala Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya dan Museum

SASARAN SUB KEGIATAN 1
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
IK: Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
Nama Sub Kegiatan: Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 2
Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
IK: Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya
Nama Sub Kegiatan: Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 3
Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
IK: Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 4
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
IK: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 5
Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
IK: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi
Nama Sub Kegiatan: Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 6
Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum
IK: Jumlah Layanan Operasional Museum
Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Operasional Museum
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 7
Terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya
IK: Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 8
Terlaksananya Pengelolaan Operasional Taman Budaya
IK: Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya
Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Operasional Taman Budaya
Pengampu: JFT. Pamong Budaya Ahli Muda / Ketua Tim

SASARAN PROGRAM PENUNJANG
CROSSCUTTING: INSPEKTORAT, BPKSDM, BAPPERIDA, BKAD, BAG. ORGANISASI, DISKOMINFO

Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah
IK1: Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
DO: Hasil penilaian IRB PD
IK2: Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah
DO: Nilai Maturitas Manajemen Risiko PD
Nama Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pengampu: Sekretaris

SASARAN KEGIATAN 1
Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
IK: Nilai AKIP
DO: Hasil Penilaian SAKIP PD
Nama Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pengampu: Sekretaris

SASARAN SUB KEGIATAN 1
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pengampu: JFT Perencana Ahli Muda/ Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 2
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
IK: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Pengampu: JFT Perencana Ahli Muda/ Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 3
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
IK: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
Pengampu: JFT Perencana Ahli Muda/ Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 4
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
IK: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Pengampu: JFT Perencana Ahli Muda/ Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 5
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
IK: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Pengampu: JFT Perencana Ahli Muda/ Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 6
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
IK: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pengampu: JFT Perencana Ahli Muda/ Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 7
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
IK: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pengampu: JFT Perencana Ahli Muda/ Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 8
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
IK: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Nama Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Pengampu: JFT Perencana Ahli Muda/ Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 9
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
IK: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Pengampu: JFT Perencana Ahli Muda/ Ketua Tim

SASARAN KEGIATAN 2
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
IK: Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu
DO: (Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu / Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administasi Keuangan) X 100%
Nama Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pengampu: Sekretaris

SASARAN SUB KEGIATAN 1
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
IK Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pengampu: JFT AKPD Ahli Muda/ Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 2
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
IK: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengampu: JFT AKPD Ahli Muda/ Ketua Tim

SASARAN SUB KEGIATAN 3
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
IK: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Pengampu: JFT AKPD Ahli Muda/ Ketua Tim

SASARAN KEGIATAN 3
Terlaksananya Administrasi BMD
IK: Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD
DO: (Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang diselesaikan / Jumlah Dokumen Administrasi BMD) X 100%
Nama Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Pengampu: Sekretaris

SASARAN SUB KEGIATAN 1
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
IK: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Nama Sub Kegiatan: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN SUB KEGIATAN 2
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
IK: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Nama Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN KEGIATAN 4
Terlaksananya Administrasi Pendapatan yang tepat waktu
IK: Presentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
DO: (Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan yang selesai tepat waktu / Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan yang seharusnya disusun) X 100%
Nama Kegiatan: Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Pengampu: Sekretaris

SASARAN SUB KEGIATAN 1
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
IK: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Nama Sub Kegiatan: Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Pengampu: JFT AKPD Ahli Muda/ Ketua Tim

SASARAN KEGIATAN 5
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu
IK: Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu
DO: (Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian tepat Waktu / Dokumen Administrasi Kepegawaian) X 100%
Nama Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengampu: Sekretaris

SASARAN SUB KEGIATAN 1
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
IK: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Nama Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN SUB KEGIATAN 2
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
IK: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Nama Sub Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN KEGIATAN 6
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
IK: Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
DO: (Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD yang diselesaikan / Jumlah Dokumen Administrasi Umkm PD) X 100%
Nama Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengampu: Sekretaris

SASARAN SUB KEGIATAN 1
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
IK: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN SUB KEGIATAN 2
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
IK: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN SUB KEGIATAN 3
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
IK: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN SUB KEGIATAN 4
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
IK: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN SUB KEGIATAN 5
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
IK: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN SUB KEGIATAN 6
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
IK: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN SUB KEGIATAN 7
Tersedianya Bahan/Material
IK: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN SUB KEGIATAN 8
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
IK: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Nama Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN SUB KEGIATAN 9
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
IK: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Nama Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN KEGIATAN 7
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah
IK: Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah
DO: (Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan BMD / Jumlah Pengadaan BMD) X 100%
Nama Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengampu: Sekretaris

SASARAN SUB KEGIATAN 1
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
IK: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Nama Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN SUB KEGIATAN 2
Tersedianya Mebel
IK: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Nama Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN SUB KEGIATAN 3
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
IK: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Nama Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN SUB KEGIATAN 4
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
IK: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Nama Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN KEGIATAN 8
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
IK: Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
DO: (Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang diselesaikan / Jumlah Laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD) X 100%
Nama Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengampu: Sekretaris

SASARAN SUB KEGIATAN 1
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
IK: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN SUB KEGIATAN 2
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN KEGIATAN 9
Terpeliharanya Barang Milik Daerah
IK: Persentase BMD dalam Kondisi Baik
DO: (Jumlah BMD dalam kondisi baik / Jumlah BMD) X 100%
Nama Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengampu: Sekretaris

SASARAN SUB KEGIATAN 1
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
IK: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN SUB KEGIATAN 2
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Nama Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN SUB KEGIATAN 3
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
IK: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
Nama Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN SUB KEGIATAN 4
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
IK: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Nama Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengampu: Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian

SASARAN KEGIATAN 10
Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
IK: Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
DO: (Jumlah Laporan Administrasi Keuangan KDH/WKDH yang selesai tepat waktu /Jumlah Laporan Administrasi Keuangan KDH/WKDH yang seharusnya disusun) X 100%
Nama Kegiatan: Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pengampu: Sekretaris

SASARAN SUB KEGIATAN 1
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
IK: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pengampu: JFT AKPD Ahli Muda/ Ketua Tim

CASCADING KINERJA (Horizontal)
DINAS KEBUDAYAAN TAHUN 2025

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran PD	Program	Program			Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Pengampu Program	Sasaran	Indikator		Pengampu Kegiatan	Sasaran	Indikator		Pengampu Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Terwujudnya Berkebudayaan Maju	• Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda terhadap Pembangunan Daerah	• Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina	•		Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	• Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah • Indeks Reformasi Birokrasi	•		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Nilai AKIP	•		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	• Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
													•		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	• Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
													•		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	• Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
													•		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	• Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
													•		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
									•		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	• Presentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi	•		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	• Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran PD	Program	Program			Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Pengampu Program	Sasaran	Indikator		Pengampu Kegiatan	Sasaran	Indikator		Pengampu Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Daerah yang sesuai SAP	Keuangan yang tepat waktu				
													•		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	• Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
									•		Terlaksananya Administrasi BMD yang tepat waktu	• Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	•		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	• Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
													•		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	• Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
									•		Terlaksananya Administrasi Pendapatan yang tepat waktu	• Presentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	•		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	• Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
									•		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	• Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	•		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	• Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
													•		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	• Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
									•		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	• Presentase Dokumen pemenuhan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	•		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	• Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
													•		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran PD	Program	Program			Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Pengampu Program	Sasaran	Indikator		Pengampu Kegiatan	Sasaran	Indikator		Pengampu Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													•		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	• Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
													•		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	• Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
													•		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	• Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
													•		Tersedianya Bahan/Material	• Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
													•		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	• Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
													•		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	• Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
									•		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	• Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	•		Tersedianya Mebel	• Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
													•		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	• Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
									•		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	• Presentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	•		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
													•		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
									•		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	• Persentase BMD dalam Kondisi Baik	•		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	• Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran PD	Program	Program			Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Pengampu Program	Sasaran	Indikator		Pengampu Kegiatan	Sasaran	Indikator		Pengampu Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													•		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	• Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
													•		Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	• Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
									•		Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	• Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	•		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	• Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
					•		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	• Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	•		Meningkatnya Objek Kebudayaan yang terkelola	• Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	•		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	• Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
									•		Meningkatnya Jenis Kesenian Tradisional daerah yang dilestarikan	• Persentase Jumlah Jenis Kesenian Tradisional daerah yang dilestarikan	•		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	• Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
													•		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	• Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
					•		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	• Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	•		Meningkatnya Sejarah Lokal yang terkelola	• Jumlah Sejarah Lokal yang tercatat dan terdokumentasikan	•		Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	• Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat
					•		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	• Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	•		Meningkatnya Cagar Budaya yang ditetapkan	• Persentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang akan ditetapkan	•		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	• Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran PD	Program	Program			Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Pengampu Program	Sasaran	Indikator		Pengampu Kegiatan	Sasaran	Indikator		Pengampu Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									•		Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang sudah dikelola	• Jumlah Cagar Budaya yang pelihara	•		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	• Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

NO	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				KET
	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
1	Meningkatkan Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda terhadap Pembangunan Daerah	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindung, dikembangkan, dmanfaatkan, dan dibina	%	TW I : TW II : TW III : TW IV : 45	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	TW I : TW II : TW III : TW IV : 2	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Objek	TW I : TW II : TW III : TW IV : 5	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	TW I : TW II : TW III : TW IV : 4	Bidang Pengembangan Kebudayaan
									Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Jenis Kesenian Tradisional daerah yang dilestarikan	%	TW I : TW II : TW III : TW IV : 67	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	TW I : TW II : TW III : TW IV : 1	UPT Pengelolaan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
													Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	TW I : TW II : TW III : TW IV : 9	Bidang Pengembangan Kebudayaan
					Program Pembinaan Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	%	TW I : TW II : TW III : TW IV : 2	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang tercatat dan terdokumentasikan	Dokumen	TW I : TW II : TW III : TW IV : 2	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	TW I : TW II : TW III : TW IV : 2	Bidang Pelestarian Sejarah Budaya dan Museum
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	TW I : TW II : TW III : TW IV : 19	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Persentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang akan ditetapkan	%	TW I : TW II : TW III : TW IV : 19	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	TW I : TW II : TW III : TW IV : 7	Bidang Pelestarian Sejarah Budaya dan Museum
									Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Cagar Budaya yang pelihara	Objek	TW I : TW II : TW III : TW IV : 105	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	TW I : TW II : TW III : TW IV : 87	Bidang Pelestarian Sejarah Budaya dan Museum
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Poin	TW I : TW II : TW III : TW IV : 61	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Poin	TW I : TW II : TW III : 1 TW IV :	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	TW I : TW II : TW III : 1 TW IV :	Sekretariat
						- Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	TW I : TW II : TW III : TW IV : 62					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	TW I : TW II : TW III : TW IV : 1	Sekretariat

NO	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				KET
	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
													Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	TW I : TW II : TW III : 1 TW IV :	Sekretariat
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	TW I : TW II : TW III : TW IV : 1	Sekretariat
													Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	TW I : TW II : TW III : TW IV : 1	Sekretariat
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	%	TW I : TW II : TW III : TW IV : 100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	TW I : TW II : TW III : 22 TW IV : 22	Sekretariat
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	TW I : TW II : TW III : TW IV : 1	Sekretariat
									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	%	TW I : TW II : TW III : TW IV : 100	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	TW I : TW II : TW III : TW IV : 1	Sekretariat
													Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	TW I : TW II : TW III : TW IV : 1	Sekretariat

NO	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				KET
	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
									Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	TW I : TW II : TW III : TW IV : 100	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	TW I : TW II : TW III : TW IV : 1	Sekretariat
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	TW I : TW II : TW III : TW IV : 100	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	TW I : TW II : TW III : 1 TW IV : 1	Sekretariat
													Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	TW I : TW II : TW III : TW IV : 50	Sekretariat
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Dokumen pemenuhan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	TW I : TW II : TW III : TW IV : 100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	TW I : TW II : TW III : TW IV : 1	Sekretariat
													Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	TW I : TW II : TW III : TW IV : 4	Sekretariat
													Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	TW I : TW II : TW III : 1 TW IV :	Sekretariat
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	TW I : TW II : TW III : TW IV : 1	Sekretariat
													Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	TW I : TW II : TW III : TW IV : 1	Sekretariat

NO	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				KET
	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
													Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	TW I : TW II : TW III : TW IV : 1	Sekretariat
													Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	TW I : TW II : TW III : 1 TW IV : 3	Sekretariat
													Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	TW I : TW II : TW III : 1 TW IV : 3	Sekretariat
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	TW I : TW II : TW III : TW IV : 100	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	TW I : TW II : TW III : 2 TW IV : 25	Sekretariat
													Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	TW I : TW II : TW III : 18 TW IV :	Sekretariat
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	TW I : TW II : TW III : TW IV : 100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	TW I : TW II : TW III : 1 TW IV : 3	Sekretariat
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	TW I : TW II : TW III : 1 TW IV : 3	Sekretariat
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	%	TW I : TW II : TW III : TW IV : 93	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	TW I : TW II : TW III : 2 TW IV : 6	Sekretariat

NO	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				KET
	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
													Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	TW I : TW II : TW III : 22 TW IV : 1	Sekretariat
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	TW I : TW II : TW III : TW IV : 2	Sekretariat
									Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	TW I : TW II : TW III : TW IV : 100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	TW I : TW II : TW III : 2 TW IV : 2	Sekretariat

Soreang, 25 September 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEBUDAYAAN

IRVAN AHMAD S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197109031999031009

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km.17 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat,
Telp/Fax. 022-85871 E-mail : disbud@bandungkab.go.id.
Website : www.disbud.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 000.8.6.3/254/DISBUD/2026
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KEBUDAYAAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 800.1.5.1/002/111/ORG tentang penyusunan dokumen kinerja;
b. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 dipandang perlu menyusun Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Dinas;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6055);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 65);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 277 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 83).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini..

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan bahan/data terkait penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan Tahun 2025;
b. Mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung tahun 2025;
c. Menyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan Tahun 2025;
d. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait perihal bahan dan penetapan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan Tahun 2025;
e. Melaporkan secara berkala tentang penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan Tahun 2025 kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran

2026.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 15 Januari 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

IRVAN AHMAD S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197109031999031009

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

NOMOR : 000.8.6.3/254/DISBUD/2026

TANGGAL : 15 Januari 2026

TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KEBUDAYAAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KEBUDAYAAN TAHUN 2025

Pengarah : Kepala Dinas

Ketua : Sekretaris

Sekretaris : Perencana Ahli Pertama

Anggota :

1. Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan
2. Kepala Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya dan Museum
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
6. Pamong Budaya Ahli Pertama
7. Penelaah Teknis Kebijakan

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

IRVAN AHMAD S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 197109031999031009

REKAPITULASI TINDAK LANJUT
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
TAHUN 2025

NOMOR LHP : 700/753/Inspektorat
TANGGAL : 16 September 2025
LEMBAGA PENGAWAS : INSPEKTORAT KABUPATEN BANDUNG
SKPD : DISPARBUD KABUPATEN BANDUNG

NO.	PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	SKPD	STATUS			JUMLAH KERUGIAN DAERAH			KETERANGAN
					S	BS	BT	TEMUAN (Rp)	DISETOR (Rp)	SISA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**SAKIP**										
1.	**Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISBUDPAR Tahun 2025** **Kondisi:** -	**Rekomendasi:** Terkait komponen Evaiuasi atas Pelaporan Kinerja pada sub-komponen Pemanfaatan agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan sosialisasi internal SAKIP secara berkala guna meningkatkan pemahaman setiap pegawai terhadap tugas dan fungsinya. **Nilai:** Jika seluruh dokumen tindak lanjut telah sesuai, maka diberikan nilai 100%. Jika dokumen tindak lanjut baru sebagian yang sesuai, maka diberikan nilai 50%. Jika belum melakukan tindak lanjut atau dokumen tidak sesuai, maka diberikan nilai 0%. **Data Dukung:**	tindak lanjut telah sesuai	DISPARBUD	V			-	-	-	100 %
2.	**Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISBUDPAR Tahun 2025** **Kondisi:** -	**Rekomendasi:** Terkait Komponen Perencaan Kinerja pada sub-komponen Perbaikan Prosedur Dokumen dan Publikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar seluruh dokumen diformalkan dan dipublikasikan melalui kanal resmi Kabupaten Bandung sesuai timeline (tepat waktu) **Nilai:** Jika seluruh dokumen tindak lanjut telah sesuai, maka diberikan nilai 100%. Jika dokumen tindak lanjut baru sebagian yang sesuai, maka diberikan nilai 50%. Jika belum melakukan tindak lanjut atau dokumen tidak sesuai, maka diberikan nilai 0%. **Data Dukung:** Bukti publikasi dokumen perencanaan	tindak lanjut telah sesuai	DISPARBUD	V			-	-	-	100 %
3.	**Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISBUDPAR Tahun 2025** **Kondisi:** -	**Rekomendasi:** Terkait Evaiuasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk analisis data yang lebih mendalam guna mendukung pengambilan keputusan strategis. **Nilai:** Jika seluruh dokumen tindak lanjut telah sesuai, maka diberikan nilai 100%. Jika dokumen tindak lanjut baru sebagian yang sesuai, maka diberikan nilai 50%. Jika belum melakukan tindak lanjut atau dokumen tidak sesuai, maka diberikan nilai 0%. **Data Dukung:**	tindak lanjut telah sesuai	DISPARBUD	V			-	-	-	100 %

Keterangan: S = Selesai, BS = Belum Selesai, BT = Belum Tindak Lanjut

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025
Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung

No	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Keterangan
1.	***Perencanaan Kinerja***						
	a. Perbaikan Prosedur Dokumen dan Duplikasi						
	Agar seluruh dokumen diformalkan dan dipublikasikan melalui kanal resmi Kabupaten Bandung sesuai *timeline* (tepat waktu)	Dokumen perencanaan diformalkan dan dipublikasikan di website dinas dan tepat waktu	Diformalkannya dokumen perencanaan dan dipublikasikan tepat waktu	Bulan september-oktober 2025	Sekretariat	Proses	
2.	***Pelaporan Kinerja :***						
	a. Pemanfaatan						
	Melaksanakan sosialisasi internal SAKIP secara berkala guna meningkatkan pemahaman setiap pegawai terhadap tugas dan fungsinya	Pelaksanaan Sosialisasi SAKIP bagi Pegawai Dinas Kebudayaan	Terlaksananya Sosialisasi SAKIP bagi Pegawai Dinas Kebudayaan	Oktober - November 2025	Sekretariat	Proses	
3.	***Evaluasi Akuntablitas Kinerja Internal***						
	Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk analisis data yang lebih mendalam guna mendukung pengambilan keputusan strategis	Pelaksanaan penggunaan teknologi informasi untuk analisis data	Terlaksananya penggunaan teknologi informasi untuk analisis data	September - Desember 2025	Sekretariat	Proses	

Soreang, 25 September 2025
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

IRWAN AHMAD, S.E., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 197109031999031009

disbud
KABUPATEN BANDUNG












DINAS KEBUDAYAAN